

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SENIN, 17 OKTOBER 2022

RINGKASAN BERITA HARI INI



TATA KOTA



DITERTIBKAN: Sejumlah papan reklame di pemukiman dan pertigaan Sidoarjo semakin menjamur.

Dewan Desak Pemkab Tertibkan Papan Reklame yang Ganggu Estetika dan Keamanan

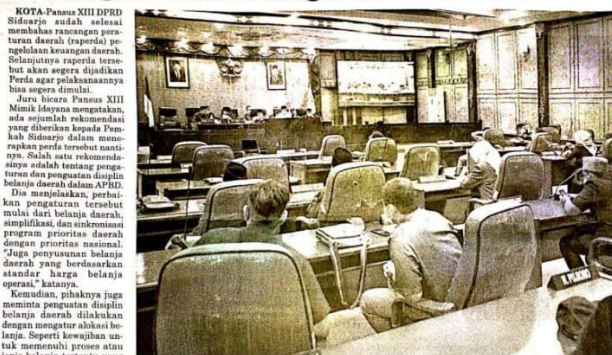
KOTA-Banyaknya papan reklame baru di sejumlah kawasan Sidoarjo mendapat sorotan anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo. Mereka mendesak mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menertibkan papan reklame rakasa yang terpasang di sejumlah jalan raya tersebut.

Banyak papan reklame baru itu dinilai kurang memperhatikan estetika serta keamanan bagi pengguna jalan sekaligus memperlambat kegiatan konstruksi bangunan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sidoarjo Deny Haryanto mengatakan, sudah selayaknya sejumlah dinas terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo menertibkan reklame. Terutama yang ada di pertigaan dan perempatan jalan raya.

Ke Halaman 10

Pembahasan Tuntas, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Segera Jadi Perda



RAMPANG: Rapat paripurna penyelesaian Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjadi perda.

KOTA-Panitia XIII DPRD Sidoarjo sudah selesai membahas rancangan peraturan daerah (perda) pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya raperda tersebut akan segera dijadikan Perda agar pelaksanaannya bisa segera dimulai.

Juru bicara Panitia XIII Mimik Hayana mengatakan, ada sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pemkab Sidoarjo dalam menyetujui raperda tersebut nantinya. Salah satu rekomendasi adalah tentang pengaturan dan pengakuan disiplin anggaran dalam APBD. Dia menjelaskan, perbaikan peraturan tersebut mulai dari belanja daerah, simplifikasi, dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional. "Jaga penyusunan belanja daerah yang berdasarkan standar," katanya.

Kemudian, pihaknya juga meminta pemerintah disiplin belanja daerah dibuktikan dengan mengurutkan akuntansi. Seperti kewajiban untuk memenuhinya proses atau jenis belanja tertentu yang dimandatkan dalam ketentuan peraturan-perundangan. Serta optimalisasi penggunaan Silpa berbasis kinerja. Mulai menyebarkan, pada ada membiayai kegiatan.

Ke Halaman 10

Komisi C Dorong Pemprov Berikan Pemanfaatan Lahan ke Warga

Sidoarjo, Memorandum Banyaknya lahan yang dimiliki Pemprov Jatim seharusnya bisa dipertahankan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta dikelola sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Jatim Khulaim Junaidi.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri banyak petani yang terpaksa menjual lahan sawah lantaran mengulung kondisi pasca panen. Ditambah permintaan kebutuhan perumahan pada zaman sekarang begitu luar biasa.

"Terkadang pemanfaat sawah lahan milik UPT Pemprov Jatim masih kurang dimaksimalkan. Sehingga, saya mendorong agar lahan itu dikerjakan oleh masyarakat," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Minggu (16/10).

Upaya ini menurutnya, dalam rangka mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Mengingat, Jatim dikenal sebagai lumbung padi. Menurutnya, selain asetya aman, karena disertifikasi dan digarakan terus, serta dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

"Jangan sampai aset provinsi membentahi pemerintah. Kalau tidak mampu mengelola sebagai PAD, sebaiknya dikerjakannya," sambung wakil rakyat asal Dapil Jatim 2 ini.

la menambahkan, yang terpenting adalah perlakuan setelah pasca panen. Banyak petani mengulung harga gabah atau padi sebelum panen begitu tinggi. Begitu masa panen harganya menurun.

"Agar petani tidak menjeri, kami berusaha membantu petani dengan program KUR, kemudian dana bergulir. Kemudian pupuk bersubsidi ini harusnya pemerintah juga menambah kuantanya karena menjadi perhatian kami," terangnya.

"Bulog harus hadir di tengah-tengah petani karena bisa mengatur harga pada saat panen, dan harus membeli agar tidak terjadi penumpukan. Sehingga harga bisa menurun. Kemudian pemasaran hasil panen, mengantisipasi penurunan harga pada saat panen," jelasnya.

Dirinya menegaskan, meski permintaan perumahan meningkat, jangan sampai menggunakan kewenangan kepala daerah untuk mengubah kondisi yang seharusnya lahan hijau menjadi lahan kuning.

"Kalau memang masalah penyusutan, selama LP2B tidak terganggu tidak ada masalah, tapi upaya pengaturan rencana dari pemerintah harus benar dan sesuai, agar tidak menggunakan lahan secara sembarangan," pungkasnya. (jok/mik)

Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Pendidikan Anggarkan Rehab Sedang dan Berat SD Rp 4,1 Miliar

Pemkab di dewan menyekapkan anggaran untuk memperbaiki kerusakan ruang kelas, terutama pada tingkat Sekolah Dasar. Anggaran tersebut masuk dalam perencanaan APBD 2023.

ANISA FIRDAUS, Widyaiswara Palar Sidoarjo



PERBAIKAN: Kondisi atap kelas SDN Wiru 2 rusak pada akhir Maret lalu.

Komisi C Minta ULP Pilih Rekanan Berkualitas

KOTA-Anggaran Perbaikan APBD 2022 sudah selesai. Pemkab diminta segera cepat untuk menyelesaikan proses pelaksanaan yang masuk dalam perencanaan. Namun langkah cepat tersebut tetap harus disertai dengan kualitas yang bagus.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Bayu Nurcahyo meminta agar ULP bisa memilih rekanan yang berkualitas. Salah satu syaratnya adalah perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik.

Hal itu akan sangat mempengaruhi kualitas pekerjaan, juga sangat menentukan hasil pekerjaan dan disosialisasikan baik ke publik. Dia menambahkan,

Selain itu, dalam penganggaran, pihaknya meminta pemkab untuk mempertimbangkan faktor risiko. Pihaknya juga meminta pemkab untuk segera melakukan proses tender yang ada di APBD. "Tua yang akan terpilih untuk dilaksanakan, pastikan kualitasnya," pungkasnya.

Untuk itu, dia berharap, saat kontraktor tidak ada yang menang tidak ada program. Minimal sudah mampu dari segi keuangan, punya kualifikasi yang baik, atau minimal sudah memiliki rekam jejak yang baik dan dipertimbangkan.

Ke Halaman 10

UMKM Komisi D Dorong Peningkatan Potensi Destinasi Wisata

KOTA-Destinas wisata di sebuah daerah merupakan kebanggaan tersendiri. Selain itu juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perkai hal itu, Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong dan mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk membuat konsep yang bagus terhadap tempat-tempat wisata yang ada di Kota Delta.

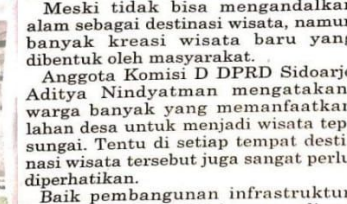
Meski tidak bisa mengandalkan alam sebagai destinasi wisata, namun, banyak kreasi wisata baru yang dibentuk oleh masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyantama mengatakan, lahan desa untuk menjadi wisata tepung sungai. Tentu di setiap tempat destinasi wisata tersebut juga sangat perlu diperhatikan.

Bak pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalannya, aliran listrik, serta penataan kawasan wisata untuk daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau pengunjung.

Pihaknya mendukung dan mendorong pemkab lebih serius dalam membuat konsep menjadikan destinasi wisata. Sebab hal tersebut merupakan salah satu pendongkrak peningkatan PAD.

"Apalagi setelah kasus Covid-19 melanda, destinasi wisata diharapkan digarakan kembali bersama pemerintah desanya," ujarnya. (nis/vga)



JARAN MOJOK: Suasana saat proyek perbaikan jalan di kawasan Arah.



Khulaim Junaidi

Tuntaskan Pembahasan, DPRD Sidoarjo Sahkan Perda P-APB 2022

Dorong Pemkab Gunakan Anggaran Pembinaan Kinerja

Sidoarjo-HASAN BANGSA DPRD Kabupaten Sidoarjo menyetujui rancangan perda (perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PABD) Tahun 2022 melalui Rapat Paripurna, di gedung DPRD Sidoarjo, 30 September 2022.

Perda-Pada melalui pandangan akhir yang dilakukan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muzakkiyah Saifulhuda (PKS) menyatakan, perda tersebut akan segera ditandatangani Bupati Sidoarjo.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo juga menekankan, Pemkab Sidoarjo harus menggunakan anggaran tersebut untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. "Kita harus memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah," ujarnya.

Ke Halaman 10

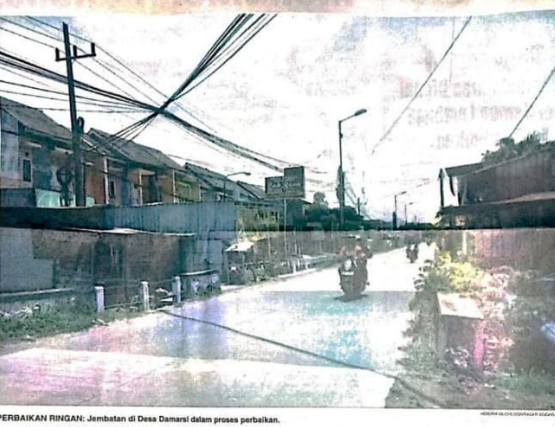
Ribuan Warga Kuningkan Sidoarjo di Jalan Sehat HUT Golkar ke-58

KOTA-Ribuan kader dan simpatisan Partai Golkar Kuningkan Sidoarjo di jalan sehat HUT Golkar ke-58 yang digelar di Jalan Sehat HUT Golkar ke-58, Minggu (16/10). Sejak pukul 05.30, para kader dan simpatisan Partai Golkar Kuningkan Sidoarjo mulai terlihat berbondong-bondong mengenakan kaos berwarna kuning.

Kegiatan ini semakin terlihat meriah tatkala peserta jalan sehat akan diberangkatkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi. Hingga pukul 05.30, para kader dan simpatisan Partai Golkar Kuningkan Sidoarjo mulai terlihat berbondong-bondong mengenakan kaos berwarna kuning.

Ketua DPP Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mempererat tali persaudaraan antar kader dan simpatisan Partai Golkar Kuningkan Sidoarjo.

Ke Halaman 10



PERBAIKAN RINGAN: Jembatan di Desa Damarsi dalam proses perbaikan.

DPUBMSDA Kebut Perbaikan Jembatan Damarsi

BUDURAN-Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) membuat untuk perbaikan jembatan di Desa Damarsi, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Sidoarjo. Kepala DPUBMSDA Dwi Eko Saptono mengungkapkan, perbaikan jembatan tersebut masuk kategori pekerjaan ringan. Karena pekerjaan itu tidak sampai membongkar struktur jembatan itu. "Hanya mengganti pelat baja," terangnya.

Dia menjelaskan, perbaikan perlu dilakukan karena pelat baja jembatan ada yang rusak. Jika dibiarkan begitu, maka akan membahayakan pengguna yang melintas.

Tetapi, kerusakan di Jembatan Damarsi juga tidak dapat dibiarkan. "Kita akan segera melakukan perbaikan," pungkasnya.

Tuntaskan Pembahasan, DPRD Sidoarjo Sahkan Perda P-APB 2022

Sidoarjo-HASAN BANGSA DPRD Kabupaten Sidoarjo menyetujui rancangan perda (perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PABD) Tahun 2022 melalui Rapat Paripurna, di gedung DPRD Sidoarjo, 30 September 2022.

Perda-Pada melalui pandangan akhir yang dilakukan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muzakkiyah Saifulhuda (PKS) menyatakan, perda tersebut akan segera ditandatangani Bupati Sidoarjo.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo juga menekankan, Pemkab Sidoarjo harus menggunakan anggaran tersebut untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. "Kita harus memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah," ujarnya.

Ke Halaman 10

Dorong Pemkab Gunakan Anggaran Pembinaan Kinerja

Sidoarjo-HASAN BANGSA DPRD Kabupaten Sidoarjo menyetujui rancangan perda (perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PABD) Tahun 2022 melalui Rapat Paripurna, di gedung DPRD Sidoarjo, 30 September 2022.

Perda-Pada melalui pandangan akhir yang dilakukan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muzakkiyah Saifulhuda (PKS) menyatakan, perda tersebut akan segera ditandatangani Bupati Sidoarjo.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo juga menekankan, Pemkab Sidoarjo harus menggunakan anggaran tersebut untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. "Kita harus memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah," ujarnya.

Ke Halaman 10



TEKEN: Ketua DPRD Sidoarjo Usman meneken persetujuan bersama PABD 2022 dengan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, 30 September 2022.



BERBAKTI: Fraksi-Pada DPRD Sidoarjo menyerahkan pandangan akhir tentang Raperda P-APB 2022.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

■ UMKM

Komisi D Dorong Peningkatan Potensi Destinasi Wisata

KOTA-Destinasi wisata di sebuah daerah merupakan kebanggaan tersendiri. Selain itu juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Terkait hal itu, Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong dan mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk membuat konsep yang bagus terhadap tempat-tempat wisata yang ada di Kota Delta.

Meski tidak bisa mengandalkan alam sebagai destinasi wisata, namun banyak kreasi wisata baru yang dibentuk oleh masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman mengatakan, warga banyak yang memanfaatkan lahan desa untuk menjadi wisata tepi sungai. Tentu di setiap tempat destinasi wisata tersebut juga sangat perlu diperhatikan.

Baik pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalannya, aliran listrik, serta penataan kawasan wisata untuk daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau pengunjung.

Pihaknya mendukung dan mendorong Pemkab lebih serius dalam membuat konsep menjadikan destinasi wisata. Sebab hal tersebut merupakan salah satu pendongkrak peningkatan PAD.

"Apalagi setelah kasus Covid-19 melandai, destinasi wisata diharapkan digairahkan kembali bersama pemerintah desanya," ujarnya. (nis/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pembahasan Tuntas, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Segera Jadi Perda

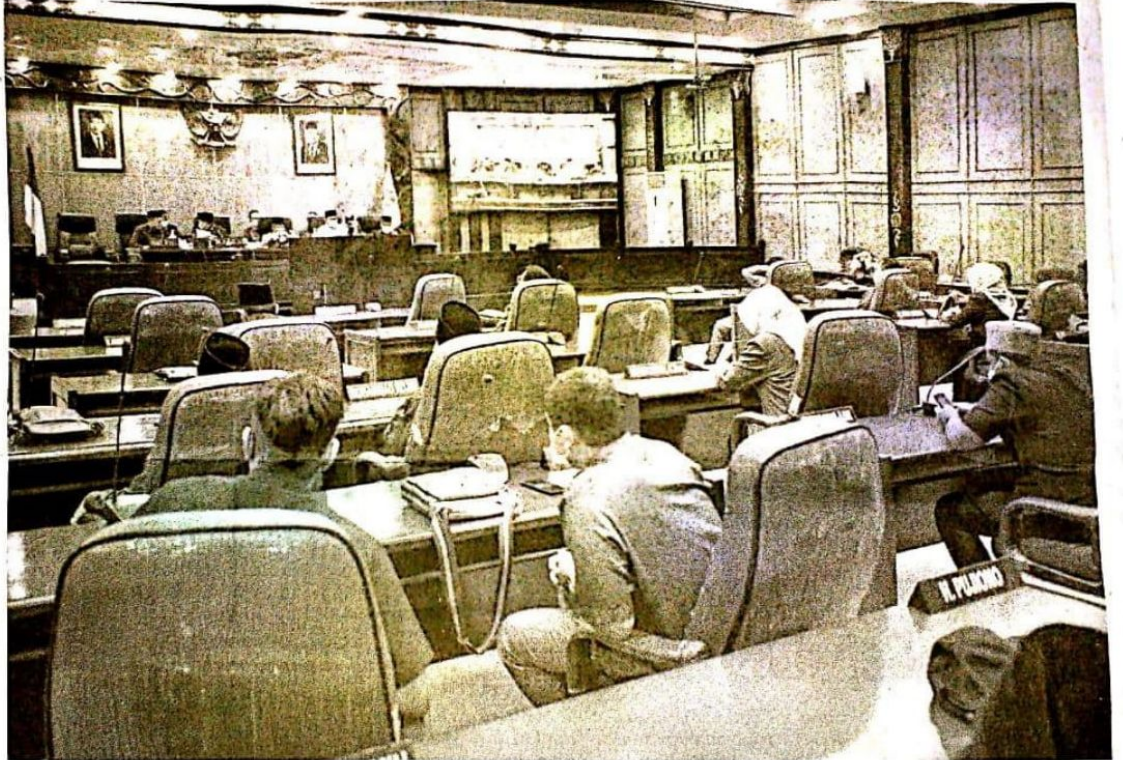
KOTA-Pansus XIII DPRD Sidoarjo sudah selesai membahas rancangan peraturan daerah (raperda) pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya raperda tersebut akan segera dijadikan Perda agar pelaksanaannya bisa segera dimulai.

Juru bicara Pansus XIII Mimik Idayana mengatakan, ada sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pemkab Sidoarjo dalam men-rapakan perda tersebut nanti-nya. Salah satu rekomenda-sinya adalah tentang pengat-uran dan penguatan disiplin belanja daerah dalam APBD.

Dia menjelaskan, perbaik-an pengaturan tersebut mulai dari belanja daerah, simplifikasi, dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional. "Juga penyusunan belanja daerah yang berdasarkan standar harga belanja operasi," katanya.

Kemudian, pihaknya juga meminta penguatan disiplin belanja daerah dilakukan dengan mengatur alokasi be-lanja. Seperti kewajiban un-tuk memenuhi proses atau jenis belanja tertentu yang dimandatkan dalam keten-tuan perundang-undangan. Serta optimalisasi penggu-naan Silpa berbasis kinerja.

Mimik menyebutkan, pansus menilai peningkatan



RAMPUNG: Rapat paripurna penyetujuan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjadi perda.

kualitas belanja daerah juga bisa dilakukan melalui peningkatan SDM aparatur pengelola keuangan. "Selain

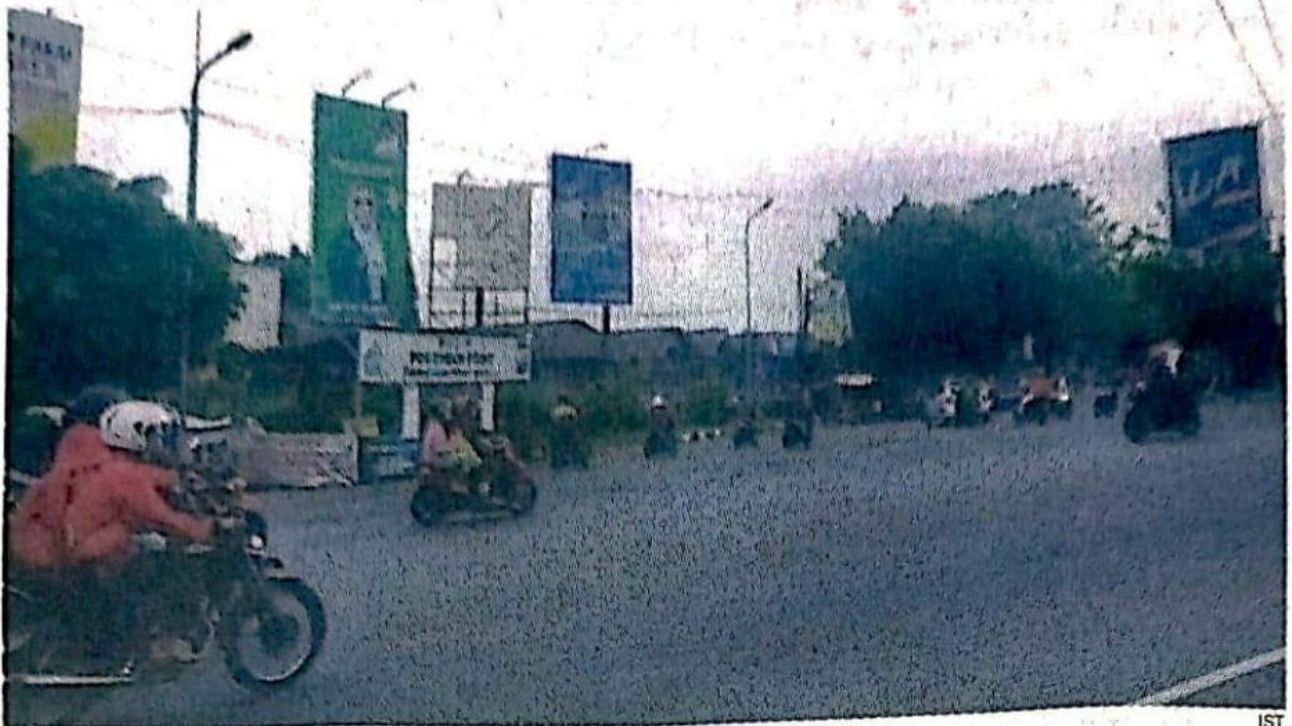
itu perlu penguatan dalam aspek pengawasan," ujarnya. Untuk itu, Pansus XIII me-nyebutkan perlu ada sertifi-

kasi bagi aparatur pengelola keuangan dan keterlibatan pengawas intern.

Sebab pemerintah yang

bertanggung jawab lang-sung ke presiden atas Ran-cangan APBD serta pelak-sanaannya. (nis/vga)

TATA KOTA



DITERTIBKAN: Sejumlah papan reklame di perempatan dan pertigaan Sidoarjo semakin menjamur.

Dewan Desak Pemkab Tertibkan Papan Reklame yang Ganggu Estetika dan Keamanan

KOTA-Banyaknya papan reklame baru di sejumlah kawasan Sidoarjo mendapat sorotan anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo. Mereka mendesak mendesak sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menertibkan papan reklame raksasa yang terpasang di sejumlah ruas jalan raya tersebut.

Banyak papan reklame baru itu dinilai kurang memperhatikan estetika serta keamanan

bagi pengguna jalan sekaligus mempertimbangkan kekuatan konstruksi bangunan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sidoarjo Deny Haryanto mengatakan, sudah selayaknya sejumlah dinas terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo menertibkan reklame. Terutama yang ada di pertigaan dan perempatan jalan raya.

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dewan Desak Pemkab...

"Penertiban ini penting. Selain sebagai antisipasi estetika dan tata kota juga keamanan bangunan papan reklame baru. Misalnya jangan sampai papan reklame menutup rambu-rambu lalu lintas. Penertiban ini sekaligus untuk menginventarisir dan menggali kembali nilai potensi pendapatan dari penjualan layanan papan reklame itu di Sidoarjo," ujar Deny, Jumat (14/10).

Karena itu, Deny bersama Komisi B DPRD Sidoarjo bakal segera memanggil sejumlah dinas terkait untuk penertiban papan reklame itu. Sejumlah dinas yang bakal dipanggil itu di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) serta Satpol PP. Alasannya, ketiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu yang dapat bekerjasama dalam penertiban papan reklame yang makin menjamur tersebut.

"Kalau seluruh OPD terkait kita

panggil, maka penertiban bukan hanya soal papan reklame lama yang masih belum tertata dengan baik. Namun, juga penertiban penempatan papan reklame baru. Karena setelah penertiban, maka titik baru reklame wajib mempertimbangkan segi estetika, kekuatan konstruksi bangunan dan segi keamanan terkait jarak bangunan papan reklame dari jalan raya," ungkap Ketua DPD PKS Sidoarjo itu.

Berbagai pertimbangan itu, kata Deny, untuk mencegah agar papan reklame aman saat ada amukan angin kencang di musim hujan.

"Artinya jangan sampai ada papan reklame menarik perhatian karena pernak-perniknya, tapi justru membahayakan bagi pengguna jalan atau sopir dan pengendara motor. Apalagi,

memicu kecelakaan karena memperhatikan papan reklame itu," tegasnya.

Sementara itu, Plt Asisten II Pemkab Sidoarjo Budi Basuki siap menampung masukan DPRD Sidoarjo itu. Pihaknya, bakal berkoordinasi dengan sejumlah OPD terkait untuk melaksanakan penertiban papan reklame itu. Menurut Budi penertiban penempatan papan reklame, terutama yang berukuran besar sudah saatnya direalisasikan. Terutama, papan reklame yang kurang memperhatikan segi estetika, kekuatan konstruksi bangunan dan keamanan bangunan.

"Penertiban bukan hanya papan reklame yang lama. Tetapi papan reklame baru yang masih proses pengajuan dalam penempatan harus memperhatikan berbagai aspek

keamanan dan estetika. Karena itu, sebelum penentuan titik baru itu, harus melibatkan tim teknis. Mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), DPMPTSP serta BPPD Pemkab Sidoarjo," papar Budi yang juga alumni SMAN 1 Sidoarjo itu.

Terpisah, Kepala Satpol PP Sidoarjo Tjarda mengaku siap melaksanakan penertiban papan reklame. Namun, penertiban itu harus berdasarkan permintaan OPD terkait lainnya.

"Kami siap saja melaksanakan penertiban papan reklame. Karena penertiban itu demi perbaikan dan kebaikan tata kota Sidoarjo," ucap mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Sidoarjo itu. (son/vga)



Komisi C Minta ULP Pilih Rekanan Berkualitas

KOTA-Anggaran Perubahan APBD 2022 sudah digedok. Pemkab diminta bergerak cepat untuk menyelesaikan pembangunan yang masuk dalam perencanaan. Namun langkah cepat tersebut tetap harus diiringi dengan kualitas yang bagus.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Suyarno meminta agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) bisa memilih rekanan yang berkualitas. Salah satu syaratnya adalah punya sistem keuangan yang baik.

Hal itu selain untuk menjaga kualitas pekerjaan, juga untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Dia mengimbau,

jangan sampai ada pembangunan yang pekerjaannya tidak selesai saat tutup tahun anggaran. Meski kontraktor harus membayar denda, namun dia menyangkan jika pekerjaan tersebut tidak selesai.

"Karena efeknya ke masyarakat, mereka jadi tidak bisa menikmati hasil pembangunan," katanya.

Untuk itu, dia berpesan, saat kontraktor ikut lelang, paling tidak ada prasyarat. Minimal adalah mampu dari segi keuangan, punya kualitas yang baik, atau minimal punya kantor. Sehingga kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam pengerjaan pembangunan, pihaknya meminta Pemkab untuk mempertimbangkan faktor cuaca. Akhir-akhir ini hujan mulai mengguyur di wilayah Kota Delta. Dikhawatirkan pengerjaan proyek akan terganggu.

"Itu juga harus diantisipasi, jika terganggu cuaca, ada kemungkinan molor pekerjaannya," imbuhnya.

Pihaknya juga memberi atensi kepada seluruh OPD untuk segera menjalankan program prioritas Pemkab. Terutama program yang ada di RPJMD. "Itu yang paling penting untuk dijalankan," pungkasnya. (nis/vga)



JANGAN MOLOR: Salah satu proyek pelebaran jalan di kawasan Aloha yang dikerjakan DPUBMSDA.

Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Pendidikan Anggarkan Rehab Sedang dan Berat SD Rp 4,1 Miliar

Pemkab dan dewan menyiapkan anggaran untuk memperbaiki kerusakan ruang kelas. Terutama pada tingkat Sekolah Dasar. Anggaran tersebut masuk dalam perencanaan APBD 2023.

ANNISA FIRDAUSI, Wartawan Radar Sidoarjo

ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, tahun depan anggaran untuk rehab sedang atau berat ruang kelas sebesar Rp 4,19 miliar. Turun drastis dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 30 miliar.

Meski begitu, anggaran yang sudah disiapkan tersebut bakal dialokasikan untuk ruang kelas yang kerusakannya sudah

parah. Total ada empat lembaga SD negeri dengan kondisi sangar rusak berat dan mengkhawatirkan.

Yakni SDN Katerungan Krian, SDN Waru 2, SDN Tambaksawah, dan SDN Banjarsari.

Menurut Bangun, untuk menentukan sasaran perbaikan tersebut sudah dilakukan pembahasan sebelumnya.

Diakuinya memang belum



PERBAIKAN: Kondisi atap kelas SDN Waru 2 rusak pada akhir Maret lalu.

Anggarkan Rehab...

semua ruang kelas SDN layak. "Namun yang paling parah empat itu kamu prioritaskan," katanya.

SDN Waru 2 misalnya. Dari 10 kelas, 3 kelas rusak dan tidak bisa digunakan. Atap kelas ambruk sejak November 2021 silam. Siswa bahkan harus masuk dengan sistem sif.

Sempat dianggarkan perbaikan pada tahun ini tetapi tidak anggarannya terbatas.

Selain untuk perbaikan ruang kelas, tahun depan juga akan ada

pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 850 juta. Namun pembangunannya diperuntukkan bagi lembaga SD/MI swasta. (*vga)

Komisi C Dorong Pemprov Berikan Pemanfaatan Lahan ke Warga

Sidoarjo, Memorandum

Banyaknya lahan yang dimiliki Pemprov Jatim seharusnya bisa dipertahankan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta dikelola sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu disampaikan anggota Komisi C DPRD



Khulaim Junaidi

Jatim Khulaim Junaidi.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri banyak petani yang terpaksa menjual lahan sawah lantaran mengeluhkan kondisi pasca panen. Ditambah permintaan kebutuhan perumahan pada zaman sekarang begitu luar biasa.

"Terkadang pemanfaatan setiap lahan milik UPT Pemprov Jatim masih kurang dimaksimalkan. Sehingga, saya mendorong agar lahan itu dikerjakan oleh masyarakat," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Minggu (16/10).

Upaya ini menurutnya, dalam rangka mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Mengingat, Jatim dikenal sebagai lumbung padi. Menurutnya, selain asetnya aman, karena disertifikasi dan digerakkan terus, serta dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

"Jangan sampai aset provinsi membebani pemerintah. Kalau tidak mampu mengelola sebagai PAD, sebaiknya dikerjasamakan," sambung wakil rakyat asal Dapil Jatim 2 ini.

Ia menambahkan, yang terpenting adalah perlakuan setelah pasca panen. Banyak petani mengeluhkan harga gabah atau padi sebelum panen begitu tinggi. Begitu masa panen harganya menurun.

"Agar petani tidak menjerit, kami berusaha membantu petani dengan program KUR, kemudian dana bergulir. Kemudian pupuk bersubsidi ini harusnya pemerintah juga menambah kuotanya karena menjadi perhatian kami," terangnya.

"Bulog harus hadir di tengah-tengah petani karena bisa mengatur harga pada saat panen, dan harus membeli agar tidak terjadi penumpukan. Sehingga harga bisa menurun. Kemudian pemasaran hasil panen, mengantisipasi penurunan harga pada saat panen," jelasnya.

Dirinya menegaskan, meski permintaan perumahan meninggi, jangan sampai menggunakan kewenangan kepala daerah untuk mengubah kondisi yang seharusnya lahan hijau menjadi lahan kuning.

"Kalau memang masalah penyusutan, selama LP2B tidak terganggu tidak ada masalah, tapi upaya pengaturan rencana dari pemerintah harus benar dan sesuai, agar tidak menggunakan lahan secara sembarangan," pungkasnya. (jok/mik)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Legislator

Desak Penertiban Reklame

SIDOARJO - Anggota DPRD Sidoarjo Jawa Timur mendesak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo menertibkan papan reklame raksasa yang terpasang di sejumlah ruas jalan utama di kabupaten setempat.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Deny Haryanto Jumat mengatakan penertiban itu perlu dilakukan karena estetika dan juga keamanan bagi pengguna jalan sekaligus kekuatan konstruksi bangunan.

"Penertiban ini penting. Selain sebagaiantisipasi estetika dan tata kota juga keamanan bangunan papan reklame baru," kata dia.

Ia mengatakan, jangan sampai papan reklame menutup rambu-rambu lalu lintas. "Penertiban ini sekaligus untuk menginventarisir dan menggali kembali nilai potensi pendapatan dari penjualan layanan papan reklame itu di Sidoarjo," ucapnya.

Dia bersama Komisi B DPRD Sidoarjo bakal memanggil sejumlah dinas terkait untuk penertiban papan reklame itu. Sejumlah dinas yang bakal dipanggil itu di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) serta Satpol PP Pemkab Sidoarjo.

Alasannya, ketiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu yang dapat bekerjasama dalam penertiban papan reklame yang makin menjamur di Sidoarjo.

"Kalau seluruh OPD terkait kami panggil, maka penertiban bukan hanya soal papan reklame lama yang masih belum tertata dengan baik," ujarnya.

Ia mengatakan, setelah penertiban, maka titik baru reklame wajib mempertimbangkan segi estetika, kekuatan konstruksi bangunan dan segi keamanan terkait jarak bangunan papan reklame dari jalan raya.

Berbagai pertimbangan itu, kata Deny untuk mencegah agar papan reklame aman saat ada amukan angin kencang (puting beliung) saat musim hujan. Selain itu, juga aman saat pengguna jalan atau sopir memperhatikan papan reklame yang selalu dibuat menarik bagi pengguna jalan.

Plt Asisten II Pemkab Sidoarjo, Budi Basuki bakal siap menampung masukan DPRD Sidoarjo itu. "Kami berkoordinasi dengan sejumlah OPD terkait untuk melaksanakan penertiban papan reklame itu," tuturnya.

Satpol PP Pemkab Sidoarjo, Tjarda mengaku siap melaksanakan penertiban papan reklame. Namun, penertiban itu harus berdasarkan permintaan OPD terkait lainnya. • Loe

DPRD Desak Penertiban Reklame Jalan Utama

SIDOARJO (BM) - Anggota DPRD Sidoarjo Jawa Timur mendesak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo menertibkan papan reklame raksasa yang terpasang di sejumlah ruas jalan utama di kabupaten setempat.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Deny Haryanto mengatakan, penertiban itu perlu dilakukan karena estetika dan juga keamanan bagi pengguna jalan sekaligus kekuatan konstruksi bangunan. "Penertiban ini penting. Selain sebagaiantisipasi estetika dan tata kota juga keamanan bangunan papan reklame baru," kata dia, akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, jangan sampai papan reklame menutup rambu-rambu lalu lintas. "Penertiban ini sekaligus untuk menginventarisir dan menggali kembali nilai potensi pendapatan dari penjualan layanan papan reklame itu di Sidoarjo," ucapnya.

Dia bersama Komisi B DPRD Sidoarjo bakal memanggil sejumlah dinas terkait untuk penertiban papan reklame itu. Sejumlah dinas yang bakal dipanggil itu di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) serta Satpol PP Pemkab Sidoarjo.

Alasannya, ketiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu yang dapat bekerjasama dalam penertiban papan reklame yang makin menjamur di Sidoarjo. "Kalau seluruh OPD terkait kami panggil, maka penertiban bukan hanya soal papan reklame lama yang masih belum tertata dengan baik," ujarnya.

Ia mengatakan, setelah penertiban, maka titik baru reklame wajib mempertimbangkan segi estetika, kekuatan konstruksi bangunan dan segi keamanan terkait jarak bangunan papan reklame dari jalan raya.

Berbagai pertimbangan itu, kata Deny untuk mencegah agar papan reklame aman saat ada amukan angin kencang (puting beliung) saat musim hujan. Selain itu, juga aman saat pengguna jalan atau sopir memperhatikan papan reklame yang selalu dibuat menarik bagi pengguna jalan.

"Artinya jangan sampai ada papan reklame menarik perhatian karena pernah-bernyanya, tapi justru membahayakan bagi pengguna jalan atau sopir dan pengendara motor. Apalagi, memicu kecelakaan karena memperhatikan papan reklame itu," ujarnya.

Sementara Plt Asisten II Pemkab Sidoarjo, Budi Basuki bakal siap menampung masukan DPRD Sidoarjo itu. "Kami berkoordinasi dengan sejumlah OPD terkait untuk melaksanakan penertiban papan reklame itu," tuturnya.

Menurut Budi penertiban penempatan papan reklame, terutama yang berukuran besar (raksasa) itu sudah saatnya direalisasikan. Terutama, papan reklame yang kurang memperhatikan segi estetika, kekuatan konstruksi bangunan dan keamanan bangunan.

"Penertiban bukan hanya papan reklame yang lama. Tetapi papan reklame baru yang masih proses pengajuan dalam penempatan harus memperhatikan berbagai aspek keamanan dan estetika. Karena itu, sebelum penentuan titik baru itu, harus melibatkan tim teknis. Mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), DPM PTSP serta BPPD Pemkab Sidoarjo," ujarnya.

Kepala Satpol PP Pemkab Sidoarjo, Tjarda mengaku siap melaksanakan penertiban papan reklame. Namun, penertiban itu harus berdasarkan permintaan OPD terkait lainnya. "Kami siap saja melaksanakan penertiban papan reklame. Karena penertiban itu demi perbaikan dan kebaikan tata kota Sidoarjo," katanya. (udi)



PAPAN REKLAME: Salah satu papan reklame yang terpasang di ruas jalan utama di Kabupaten Sidoarjo.

BM1ST

Tekan Kasus KDRT dan Angka Perceraian, Ratusan Catin Ikuti Seminar Pranikah

Sidoarjo, Pojok Kiri

Tingginya angka kasus perceraian di Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena kurang siapnya bekal yang dimiliki pasangan muda dalam mengarungi rumah tangga. Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), himpitan ekonomi sampai adanya orang ketiga menjadi latar belakang terjadinya perceraian. Rata-rata mereka adalah pasangan muda yang usia pernikahannya relatif seumur jagung. Permasalahannya, karena pasangan muda rata-rata tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa itu tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Yang terjadi, harapan menjadikan keluarga Sakinah Mawaddah Warahuna (Samawa) pupus ditengah jalan. Hal ini yang menjadi

perhatian Ormas Persaudaraan Muslimah untuk tunun memberikan pemahaman dan pengetahuan lewat seminar pra nikah. Kegiatan ini mencakup aspek penguatan konsep diri pra nikah dan aspek hukum. Seminar pra nikah dibuka oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, di Hotel Aston Sidoarjo diikuti ratusan peserta muda mudi Calon Pengantin (Catin), Minggu (16/10/2022).

"Angka perceraian di Kabupaten Sidoarjo, apalagi ketika covid 19 mengalami kenaikan yang signifikan, per hari ada 13 orang yang cerai, jadi kalau jumlah setahun sekitar 4.000 kasus perceraian" jelasnya.

Memor Gus Muhdlor, panggilan Bupati Sidoarjo program pendidikan pra nikah ini sangat

tepat dan sinkron dengan kondisi saat ini. Edukasi ini yang harus menjadi komitmen kita bersama.

"Pada intinya membangun Indonesia adalah lewat organ atau stakeholder paling kecil, bukan RT, bukan camat, bukan bupati bahkan gubernur, tapi kepala rumah tangganya," jelasnya.

Rumah tangga ini organisasi paling simpel, memastikan diri berjalan dengan baik, sesuai dengan fungsi, maka bisa dipastikan kesejahteraan bisa terjamin. Program pendidikan pra nikah Salimah ini menjadi program yang wajib dilanjutkan.

Lebih lanjut, Ketua PD Salimah Sidoarjo, Peny Eva Yanti, ST, juga menegaskan selama ini banyak sekali kasus - kasus prob-lematika dalam rumah tangga yang



Ratusan Catin saat ikuti seminar pranikah

memicu terjadinya perceraian, sehingga angka perceraian tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Ini yang menjadi fokus PD salima Sidoarjo untuk melaksanakan program pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Sidoarjo.

"Harapannya program ini akan memberikan edukasi kepada calon pengantin dalam memberikan upaya atau solusi terbaik didalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya kelak," jelasnya.

Lebih lanjut, program PD Salimah ini sangat sinkron dengan program yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo dalam membentuk keluarga berencana.

Melalui Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo dengan mempersiapkan Calon Pengantin (Catin) Dari sisi kesehatannya.

Dimana calon pengantin di Kabupaten Sidoarjo wajib mengisi di aplikasi elsimil, untuk monitoring dan pendampingan untuk memastikan kesiapan menikah dan hamil, tujuan akhirnya adalah menuju zero stunting. Dan program salimah ini tujuannya adalah pendampingan catin secara psikis. Harapan kedepannya, adanya kolaborasi kedua program ini bisa mewujudkan keluarga dengan kualitas unggul dan sejahtera. (Khol/ Fs)

POJOK KIRI

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Pemkab Sidoarjo Mendapat Apresiasi dari Pemprov Jatim

SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor terus mendorong jajarannya meningkatkan pelayanan publik disetiap instansi. Terutama instansi yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat diharapkan tidak stagnan. Ia mendorong OPD agar terus menciptakan inovasi untuk kemudahan pelayanan publik.

Upaya lainnya yang tidak kalah penting kata Gus Muhdlor adalah komitmen bersama lintas OPD untuk memperkuat sinergitas. Tujuannya tidak lain agar pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo semakin baik.

"Inovasi pada pelayanan publik sangat penting, sama pentingnya dengan meningkatkan komitmen ditiap OPD. Inovasi harus didukung dengan kinerja yang progresif dan profesional. Semua harus berpikir sama bahwa tujuan utamanya adalah kepuasan publik dalam menerima pelayanan dari pemerintah," ujar Gus Muhdlor, Kamis, (13/10/22) kemarin.

Penandatanganan komitmen bersama sebelumnya telah dilakukan OPD di pendopo Delta Wibawa, Selasa, (11/10/22) lalu. Strategi pengendalian kinerja melalui Paksi (Portal Akuntabilitas Kinerja Sidoarjo) yang dilakukan Inspektoriat Sidoarjo dengan Dinas Kominfo, Bappeda, BPKAD maupun Bagian Organisasi Setda Sidoarjo diharapkan dapat meningkatkan indeks pelayanan publik.

Selain itu dukungan program validasi data dinamis dan penambahan kesepertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Sipraja juga dilakukan dinas terkait dengan kantor BPJS Kesehatan Sidoarjo. Komitmen bersama peningkatan pelayanan publik dibidang kesehatan tersebut juga didukung seluruh camat.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Dinas Perikanan dan seluruh camat serta seluruh Kades se Kecamatan Sukodono. Komitmen penandatanganan tersebut dalam rangka peningkatan potensi



Pemkab Sidoarjo dapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jatim

perikanan di Kabupaten Sidoarjo. Dilakukan juga penandatanganan komitmen bersama mendukung peningkatan penerimaan dan pengendalian pajak daerah berbasis sistem informasi eksekutif (SIE) pajak daerah dalam rangka peningkatan pajak daerah.

Penandatanganan dilakukan antara kepala Badan Pelayanan

Pajak Daerah dengan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seluruh camat.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Dr. Ramliyanto, SP., MP yang hadir mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan publiknya. Menurutnya

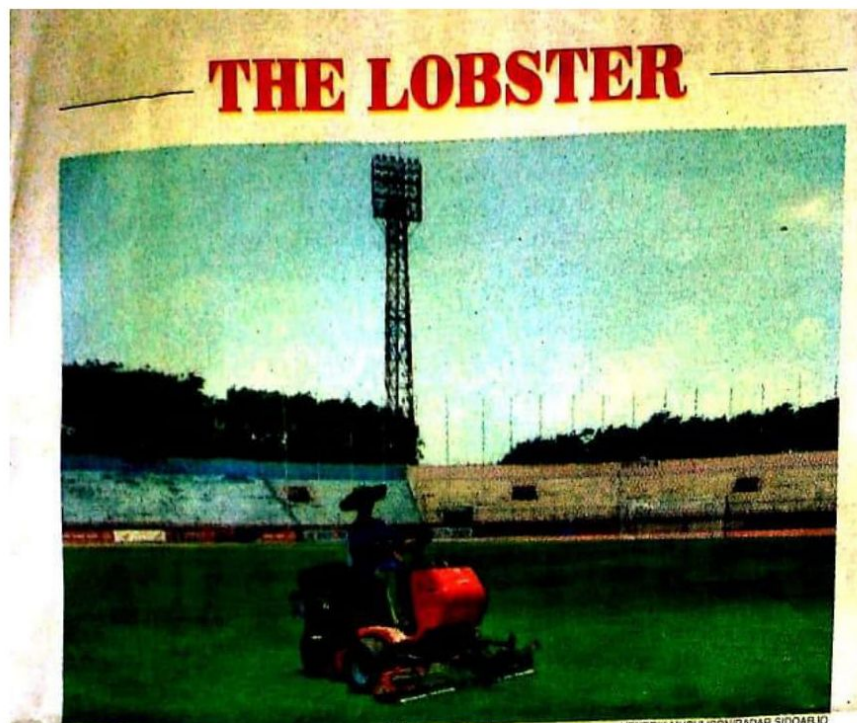
apa yang dilakukan Pemkab Sidoarjo kali ini hal yang luar biasa. Pasalnya ada kolaborasi antara stakeholder dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Antara kepala OPD, camat dan kepala desa bersepakat untuk mewujudkannya.

"Kami dari Pemerintah Jawa Timur memberikan apresiasi dan penghargaan atas inisiatif ini yang tentunya akan sangat membantu kita semua untuk mewujudkan birokrasi kita menjadi birokrasi berkelas dunia," ucapnya.

Ramli mengatakan apa yang dilakukan Pemkab Sidoarjo akan membantunya meningkatkan pelayanan publik di Jatim. Apalagi komitmen yang dilakukan Pemkab Sidoarjo sampai pada kepala desa. Dikatakannya saat ini ia mendapatkan amanat dari Gubernur Jatim untuk mengawal inovasi pelayanan publik sampai tingkat desa.

"Bu gubernur selalu sampaikan bahwa desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pembangunan pelayanan publik,"ujarnya. ● loe

DUTA



PAKAI MESIN : Pekerja saat memotong rumput Stadion Gelora Delta.

Stadion Gelora Delta Diperbaiki Berkala

KOTA-Pemkab Sidoarjo berkomitmen memperbaiki Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Selain karena aset daerah, perbaikan juga untuk memacu prestasi olahraga atlet Sidoarjo.

Nah, mumpung Liga 2 masih dihentikan sementara, sejumlah perbaikan terus disebut. Saat ini perbaikan di stadion yang menjadi kandang Deltras itu hampir sepenuhnya tuntas. Perbaikan yang dimaksud adalah sejumlah kerusakan akibat rusuh suporter dalam laga Liga 1 antara Persebaya vs Rans Nusantara beberapa waktu lalu.

“Tinggal mengganti gerbang

Pintu B, rencana minggu ini,” jelas Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, Djoko Supriyadi, Jumat (14/10)

Djoko mengungkapkan, beberapa perbaikan yang telah tuntas yakni pemasangan pagar tribun dari sektor 1 sampai sektor 10, penggantian mixer, hingga bangku pemain cadangan.

Selain itu, pihaknya secara berkala juga merawat rumput yang ada di lapangan itu. Rumput akan disiram, dipupuk, hingga dipotong secara rutin. Harapannya agar tetap

● Ke Halaman 10

Stadion Gelora Delta...

berfungsi dengan baik saat digunakan The Lobster menjamu klub-klub Liga 2. Seperti Jumat (14/10)

siang, pekerja terlihat memangkas rumput di Stadion Gelora Delta itu. Pekerja menggunakan satu unit mesin pemotong agar efisien dan hasil potongan bisa rata.

Menurut Djoko, perbaikan-perbaikan lain terkait sejumlah fasilitas di stadion bakal terus berlanjut secara berkala. Namun tetap memperhatikan kemampuan dan alokasi anggaran yang ada.

Saat ini Liga 2 juga masih ditunda. Belum ada pengumuman resmi kapan liga bakal kembali dilanjutkan. Para pemain Deltras juga masih diliburkan. (son/vga)

V Pemkab Sidoarjo Tingkatkan Pelayanan Publik lewat Paksi

Sidoarjo- HARIAN BANGSA
Pemkab Sidoarjo meningkatkan pelayanan publik melalui Portal Akuntabilitas Kinerja Sidoarjo (Paksi) yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten setempat.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Kamis (13/10), mengatakan, program tersebut dilakukan Inspektorat Sidoarjo bersama Dinas Kominfo, Bappeda, BPKAD, dan Bagian Organisasi Setda Sidoarjo guna meningkatkan indeks pelayanan publik.

"Kami mendorong jajaran meningkatkan pelayanan publik di setiap instansi. Terutama yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat diharapkan tidak stagnan," ujarnya.



Penandatanganan kesepakatan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, OPD juga didorong agar terus menciptakan inovasi untuk kemudahan pelayanan publik. "Upaya lainnya yang tidak kalah penting

adalah komitmen bersama lintas OPD untuk memperkuat sinergitas agar pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo semakin baik," ucap Gus Muhdlor, sapa-

an akrabnya.

Menurut dia, inovasi pada pelayanan publik sangat penting, sama pentingnya dengan meningkatkan komitmen di setiap OPD. "Inovasi harus didukung dengan kinerja yang progresif dan profesional. Semua harus berpikir sama bahwa tujuan utamanya adalah kepuasan publik dalam menerima pelayanan dari pemerintah," katanya.

Ia menyampaikan bahwa dukungan program validasi data dinamis dan penambahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Sipraja juga dilakukan dinas terkait dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo. "Komitmen bersama peningkatan pelayanan publik di bidang keseha-

tan tersebut juga didukung seluruh Camat," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Ramliyanto mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkab Sidoarjo kali ini hal yang luar biasa karena ada kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

"Kami memberikan apresiasi dan penghargaan atas inisiatif ini yang tentunya akan sangat membantu mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Gubernur Jatim selalu sampaikan bahwa desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pembangunan pelayanan publik," tambah dia. (ant/rd)

I Tuntaskan Pembahasan, DPRD Sidoarjo Sahkan Perda P-APBD 2022 Dorong Pemkab Gunakan Anggaran Berbasis Kinerja

Sidoarjo- HARIAN BANGSA
DPRD Kabupaten Sidoarjo menyetujui rancangan perda (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022 menjadi Perda dalam Rapat Paripurna, di gedung DPRD Sidoarjo, 30 September 2022.

Fraksi-fraksi melalui pandangan akhir yang dibacakan juru bicara Atok Ashari dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang P-APBD 2022.

Selain setuju, fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo juga memberikan sejumlah saran kepada Pemkab Sidoarjo terkait pelaksanaan P-APBD 2022. "Sejajanya perubahan anggaran tahun 2022 ini harus tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja," cetus Atok Ashari saat membacakan pandangan akhir Fraksi PKS.

Saran lainnya, Pemkab Sidoarjo juga diminta melakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang mengacu pada perundang-undangan baru tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebelumnya Atok menyatakan,



TEKEN: Ketua DPRD Sidoarjo Usman meneken persetujuan bersama Perda P-APBD 2022 dengan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, 30 September 2022.

Raperda tentang P-APBD 2022 ini sangat penting untuk dibahas karena adanya dinamisasi kebutuhan rakyat agar bisa pulih dari pandemi Covid-19 dan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Fraksi-fraksi, melalui Fraksi PKS juga mengingatkan Pemkab adanya peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022, sehingga belanja wajib dianggarkan dua persen dari dana transfer umum (DTU). Selain itu, Pemkab juga diminta

mempertimbangkan dan berkomitmen untuk bisa membentuk dana abadi daerah, yang bertujuan memberikan manfaat kepada lintas generasi.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, M Rojik saat membacakan laporan hasil pembahasan Raperda P-APBD 2022 mengatakan, DPRD meminta Pemkab Sidoarjo mengarahkan program dan kegiatan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan di Kota Delia.

Setelah penyampaian laporan dari Banggar dan pandangan akhir

fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo, dilanjutkan dengan rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang P-APBD 2022.

Ketua DPRD Sidoarjo H Usman yang memimpin rapat paripurna menawarkan ke forum paripurna untuk persetujuan Raperda tentang P-APBD 2022 ini dan dijawab setuju oleh semua peserta rapat paripurna. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dengan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. (sta/ady)



SERAHKAN: Fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo menyerahkan pandangan akhir tentang Raperda P-APBD 2022.



BACA: Juru bicara Fraksi PKS, Atok Ashari membacakan pandangan akhir fraksi mengenai Raperda P-APBD 2022.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BMST

PELAYANAN PUBLIK: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meningkatkan pelayanan publik melalui Portal Akuntabilitas Kinerja Sidoarjo (Paksi) yang dilakukan organisasi perangkat daerah di kabupaten setempat.

Pemkab Tingkatkan Pelayanan Publik Lewat “Paksi”

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo meningkatkan pelayanan publik melalui Portal Akuntabilitas Kinerja Sidoarjo (Paksi) yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten setempat.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor mengatakan, program tersebut dilakukan Inspektorat Sidoarjo bersama Dinas Kominfo, Bappeda, BPKAD, dan Bagian Organisasi Setda Sidoarjo guna meningkatkan indeks pelayanan publik.

“Kami mendorong jajaran meningkatkan pelayanan publik di setiap instansi terutama yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat diharapkan tidak stagnan,” ujarnya.

Ia mengatakan, OPD juga didorong agar terus menciptakan inovasi untuk kemudahan pelayanan publik. “Upaya lain-

nya yang tidak kalah penting adalah komitmen bersama lintas OPD untuk memperkuat sinergitas agar pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo semakin baik,” ucap Gus Muhdlor, sa-paan akrabnya.

Menurut dia, inovasi pada pelayanan publik sangat penting, sama pentingnya dengan meningkatkan komitmen di setiap OPD. “Inovasi harus didukung dengan kinerja yang progresif dan profesional. Semua harus berpikir sama bahwa tujuan utamanya adalah kepuasan publik dalam menerima pelayanan dari pemerintah,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa dukungan program validasi data dinamis dan penambahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Sipraja juga dilakukan dinas terkait dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo. “Komitmen bersama peningkatan pe-

layanan publik di bidang kesehatan tersebut juga didukung seluruh camat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Ramliyanto mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan publik.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkab Sidoarjo kali ini hal yang luar biasa karena ada kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

“Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi dan penghargaan atas inisiatif ini yang tentunya akan sangat membantu mewujudkan birokrasi berkelas dunia Gubernur Jatim selalu sampaikan bahwa desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pembangunan pelayanan publik,” kata dia. (udi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BERSIHKAN KOLAM: Sedang diperbaiki, Taman Monumen Pancasila ditutupi seng.

Hanya Revitalisasi Ringan, Taman Monumen Pancasila Mulai Digarap

KOTA-Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo terus berupaya merawat sejumlah ikon Kota Delta. Salah satunya adalah Taman Monumen Pancasila.

Dari pantauan Radar Sidoarjo, Jumat (14/10), taman yang ada di depan Exit Tol Sidoarjo itu juga mulai diperbaiki. Sebagian sisi taman ditutupi seng. Kemudian sejumlah

pekerja nampak mengeruk tanah yang ada di dasar kolam.

Kepala Bidang Pertamanan DLHK Sidoarjo Edi Setiono mengungkapkan, perbaikan yang dilakukan di taman tersebut hanya revitalisasi ringan. "Petugas hanya membersihkan kolam dan mengganti sejumlah tanaman dengan yang baru," jelasnya. Edi menambahkan, tujuannya

agar nampak lebih bersih dan indah. Kolam di taman itu sering tumbuh rumput liar. "Kalau tidak dibersihkan tentu akan terlihat kumuh," ucapnya.

Ditambah lagi, lokasi taman ada di pusat kota. Serta tepat di exit tol. Sehingga menjadi gerbang pembuka masyarakat yang masuk Sidoarjo melalui tol. "Dirawat agar lebih indah," jelasnya.

Nantinya DLHK juga bakal memperbaiki taman median jalan yang ada di timur monumen. Targetnya sampai ke titik Bundaran Taman Pinang Indah atau GOR Sidoarjo.

Selain di pusat kota, DLHK juga tengah memperbaiki media jalan di Jalan Raya Waru. Tanaman yang rusak bakal diganti baru. Termasuk trotoar yang pecah atau rusak. (son/vga)



KURANG SEDAP DIPANDANG: Kondisi Taman Monumen Pancasila di Jalan Raya Jati, Kecamatan Sidoarjo, kemarin.

Perbaiki Taman Monumen Pancasila

SIDOARJO - Taman Monumen Pancasila di Jalan Pahlawan di depan exit toll Sidoarjo mulai diperbaiki. Pengerjaan dilakukan bertahap. Mulai pengecatan monumen, pemasangan lampu hias, perbaikan kolam, pemasangan paving, hingga penambahan tanaman.

Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Edi Setiono menjelaskan, selama proses perbaikan itu, sekeliling taman ditutupi seng. "Karena lokasinya di pinggir jalan raya, juga agar tidak sampai mengganggu peng-

guna jalan," jelas Edi.

Saat ini pekerja menggarap taman di sisi timur monumen tersebut. Tembok taman, paving, dan tanaman di sisi itu dirapikan. Setelah itu, berlanjut ke perbaikan kolam di tengah monumen. Kolam dicat ulang, dibersihkan, dan ditambal yang bocor.

Edi menyatakan, air di kolam tersebut selama ini kerap kotor, bahkan berbau. Seluruh permukaan kolam juga tertutupi enceng gondok. Penyebabnya, kolam tersebut terhubung ke saluran air dari sisi barat kolam yang melewati bawah jalan

hingga masuk ke kolam tersebut. "Jadi, ada aliran air dari barat, airnya masuk ke kolam tersebut, lalu mengalir lagi ke timur hingga di depan RS Delta Surga," kata Edi.

Solusinya agar air tidak terlalu kotor, pihaknya berencana membuat penyangkai di sisi barat kolam atau depan Lippo Plaza Sidoarjo. Dengan demikian, air yang mengalir melewati kolam di Monumen Pancasila tidak terlalu kotor. "Masih diatur nanti penyangkainya seperti apa biar tidak gampang kotor meskipun sering dibersihkan," kata Edi. (uzi/c12/any)

Jawa Pos

97 Persen Warga Sudah Miliki E-KTP, Dispendukcapil Terima Permintaan Rekam Lansia dan Disabilitas

KOTA-Upaya Pemkab Sidoarjo agar semua warganya tertib administrasi terus dilakukan. Melalui program peduli disabilitas dan lansia (peduli dilan) yang digagas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), kini 97 persen warga Kota Delta sudah memiliki e-KTP.

Untuk program peduli dilan, Dispendukcapil tidak hanya bekerja sama dengan lembaga pendidikan khusus disabilitas maupun Dinas Sosial saja, tapi juga dengan pemerintah desa. Sebab ada banyak laporan dari pemerintah desa terkait penduduknya yang belum memiliki e-KTP atau administrasi kependudukan (adminduk) lainnya.

Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, setiap warga wajib mendapatkan kepastian hukum tentang status kependudukannya. Baik itu KK, akta kelahiran, akta kematian, KTP, KIA dan sebagainya. Tanpa kecuali peyandang disabilitas, pemula dan penduduk rentan lainnya.

Dia menjelaskan, pekan lalu pihaknya memenuhi permintaan dari pemerintah desa untuk lansia dan disabilitas. Total ada lima pengajuan. Lokasinya di Kecamatan Taman, Sedati, dan Sidoarjo. "Namun tidak semuanya berhasil," katanya.

Reddy menyebutkan, tidak jarang petugas menemukan kendala di lapangan. Seperti pemohon yang tidak kondusif. Sehingga proses perekaman



PEDULI DILAN: Petugas Dispendukcapil saat melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP untuk warga lansia dan disabilitas.

● Ke Halaman 10

97 Persen Warga...

sulit dilakukan. Keluarga, tetangga, dan petugas juga ikut membujuk agar mau direkam. Ada yang berhasil tapi ada juga yang tetap tidak mau.

"Ada satu kami jadwalkan ulang

perekamannya karena tidak kondusif," imbuhnya.

Menurut Reddy, ke depan peduli dilan dan program jemput bola terpadu (jebete) akan terus dilakukan.

Hal itu untuk membantu masyarakat mendapatkan haknya. Dalam Pe-

rubahan APBD 2022, pihaknya akan mendapatkan satu unit alat rekam e-KTP khusus warga disabilitas. Saat ini sudah ada dua unit, tetapi satu unit sedang rusak sehingga tidak dapat digunakan.

Dia menyebut, dengan adanya tambahan alat tersebut akan pemer-

cepat langkah mereka dalam memenuhi adminduk warga.

Dia berharap masyarakat ikut membantu dengan mengajukan atau melaporkan jika ada warga atau tetangganya yang kesulitan mengurus e-KTP karena ada kendala fisik. (nis/vga)



KOMPAK: Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi (dua dari kiri) bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (kaos putih) saat pemberangkatan jalan sehat.

Ribuan Warga Kuningkan Sidoarjo di Jalan Sehat HUT Golkar ke-58

KOTA-Ribuan kader dan simpatisan Partai Golkar menguningkan Sidoarjo di ajang jalan jalan sehat dalam HUT Partai Golkar ke-58 yang digelar DPD Partai Golkar Sidoarjo, Minggu (16/10). Sejak pukul 05.30, para kader

mulai terlihat berdatangan dengan mengenakan kaos berwarna kuning.

Kegiatan ini semakin terlihat meriah tatkala peserta jalan sehat akan diberangkatkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi. Ha-

dir pula dalam pemberangkatan tersebut, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan para pengurus Partai Golkar Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam sambutannya mengatakan ikut

● Ke Halaman 10

Ribuan Warga...

gembira dan mengucapkan selamat kepada Partai Golkar di usia ke-58. "Partai Golkar merupakan mitra konstruktif dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo," kata Gus Mudlor, panggilan akrabnya.

Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Adam Rusydi menyampaikan bahwa kegiatan jalan sehat tersebut merupakan wujud syukur kepada Allah SWT, atas semua karunia yang telah diberikanNya. Terutama untuk Partai Golkar yang sudah mencapai usia ke-58 tahun.

Selain kegiatan jalan sehat, Golkar Sidoarjo melakukan kegiatan dzikir dan doa bersama dan santunan terhadap anak-anak yatim serta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor DPD Partai Golkar. "Kegiatan dzikir bersama dan jalan sehat ini merupakan wujud syukur Partai Golkar yang sudah mencapai usia 58

tahun," kata Adam Rusydi yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim itu.

Serangkaian kegiatan bersama rakyat di HUT ke-58 ini diharapkan partai yang dipimpinnya dalam menghadapi rangkaian hajatan politik di tahun 2024 diberikan kemudahan dan diberi ridho agar Golkar bisa memenangkan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada 2024. "Target kami dalam Pemilu 2024, Partai Golkar bisa menang dan minimal setiap dapil mendapatkan kursi untuk tingkat DPRD Sidoarjo," harapnya.

Sedangkan untuk meramaikan jalan sehat beragam hadiah dipersiapkan, seperti satu unit sepeda motor, satu unit motor listrik, 4 sepeda gunung, kipas angin, lemari es dan lainnya. Untuk memeriahkan acara juga diadakan hiburan dengan mendatangkan artis Lara Silvy.

Ditempat terpisah, Ketua DPD Golkar Jatim Sarmuji mengatakan,

memasuki usia ke-58, adalah momentum bangkit untuk menang di tahun 2024 yang akan datang. "Kami ucapkan syukur memperingati Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang ke-58. Usia tersebut cukup matang untuk merefleksikan diri, mengambil semua pelajaran, ibarat seorang manusia pasti mengalami lika liku kehidupan dan Golkar sudah makan asam garam sudah pernah turun ke titik yang paling bawah dan bangkit," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

Menurut Cak Sar, lewat kegiatan jalan sehat serentak ini adalah langkah untuk menyolidkan kader Golkar di Jatim. Di Jatim, jalan sehat serentak ini digelar di 38 kabupaten kota diadakan secara bersamaan. Khusus di Malang, Partai Golkar mengadakan secara sederhana karena masih dalam suasana duka.

Sedangkan di pusat, DPP Partai Golkar menggelar acara jalan sehat di Kompleks Gelora Bung Karno

(GBK) Jakarta Pusat, Minggu (16/10) pagi. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, kegiatan ini merupakan simbol agar Indonesia sehat. Setidaknya, ada 2,7 juta peserta jalan sehat di 514 kabupaten atau kota

"Di tempat ini, ada 70 ribu yang tadi yang menyiapkan Rekor Muri ini berdasarkan rekor di satu tempat 70 ribu," kata Airlangga usai mengikuti jalan sehat di GBK, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2022).

HUT ke-58 Partai Golkar mengusung tema 'Golkar Menang, Rakyat Sejahtera'. Sementara dalam kegiatan jalan sehat itu, turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie; Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung; Wakil Ketua Umum Partai Golkar; Bambang Soesatyo; dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus dan pengurus DPP Partai Golkar lainnya. (rud/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ribuan Kader Golkar Kuningkan Alun-Alun Sidoarjo

Sidoarjo, Memorandum

Ribuan kader dan simpatisan Partai Golkar Sidoarjo memadati Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (16/10). Partai berlabang pohon Beringin itu menguningkan jalan sehat dalam rangka HUT ke-58 Partai Golkar.

Acara itu dihadiri Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ahmad Muhdhor, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi, dewan pembina Partai Golkar, para mantan dan anggota Fraksi DPRD Sidoarjo serta jajaran pengurus Golkar Sidoarjo.

Pemberangkatan jalan sehat dilakukan langsung oleh Adam Rusydi yang juga menjabat anggota DPRD Jatim. Dalam kegiatan ini, Bupati Sidoarjo yang akrab disapa Gus Muhdlor dan Kajari Sidoarjo, Ahmad Muhdhor bersama jajaran pengurus Partai Golkar juga ikut jalan sehat bersama rombongan.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengaku ikut gembira dan mengucapkan selamat kepada Partai Golkar saat usia memasuki usia 58 tahun.

"Partai Golkar menjadi mitra konstruktif dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo," ujar Gus Muhdlor, kemarin.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi menilai kegiatan jalan sehat ini menjadi wujud syukur kepada Allah SWT atas semua karunia dan lainnya yang diberikan.

Terutama, untuk Partai Golkar yang sudah mencapai usia 58 tahun. Bagi Adam, selain kegiatan jalan sehat, ini juga melakukan kegiatan dzikir dan doa bersama dan santunan untuk anak yatim serta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor DPD Partai Golkar.

"Kegiatan dzikir bersama



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) memberangkatkan jalan sehat di Alun-alun Sidoarjo.

dan jalan sehat ini merupakan wujud syukur Partai Golkar yang sudah berusia 58 tahun. Termasuk doa ketulusan anak-anak yatim menjadi spirit dan semangat DPD Golkar Sidoarjo. Bagi kami momen ini sebuah kebahagiaan dan membuktikan Partai Golkar dan rakyat tidak ada jarak," papar anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Ditambahkan oleh Adam, rangkaian kegiatan bersama rakyat di HUT ini harapannya partai yang dipimpinnya dalam menghadapi rangkaian hajatan politik di 2024. Agar diberikan kemudahan dan diberikan ridho Golkar bisa memenangkan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilukada 2024.

"Target kami dalam Pemilu 2024, Partai Golkar bisa menang dan minimal setiap dapil mendapatkan kursi untuk tingkat DPRD Sidoarjo 6 kursi dari 4 kursi," harapnya.

Sementara itu, ada momen saat Gus Muhdlor jalan bareng dengan Adam Rusydi, beberapa kali dua tokoh milenial atau tokoh muda di Sidoarjo itu terlihat tertawa terpingkal-pingkal.

Terlihat juga beberapa kali Gus Muhdlor maupun Adam Rusydi tampak memegang perut dan saling melempar candaan.

Banyak kader dan simpatisan peserta jalan sehat Hut 58 Partai Golkar yang beberapa kali



Ketua DPD Golkar Sidoarjo Adam Rusydi.

melontarkan jika dua tokoh Politik Muda itu pas jika diduetkan. "Cocok GM (Gus Muhdlor red) karo AR (Adam Rusydi red), Pasangan Sing Pas (co-

cok GM sama AR, pasangan yang pas)," celetuk salah satu peserta melihat kedekatan Gus Muhdlor dan Adam Rusydi saat jalan bersama. (dar/jok/mik)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bulan Ini, BPBD Upayakan Bentuk Desa Tangguh di Sidoarjo Barat

SIDOARJO – Belum genap sebulan, setidaknya ada empat kejadian angin puting beliung yang ditangani oleh BPBD Sidoarjo. Semuanya terjadi di wilayah barat Sidoarjo.

Kepala Bidang Pencegahan, Kedaruratan, dan Logistik Karsono mengatakan bahwa memang perlu ada desa tangguh bencana (destana) di wilayah Sidoarjo Barat. Dia mengungkapkan, saat ini ada 11 destana yang semuanya berlokasi di wilayah Sidoarjo Timur.

Awalnya, destana dibuat di beberapa wilayah timur Sidoarjo, seperti Sedati, Porong, Jabon, dan Waru, untuk melatih warga dan relawan agar bisa melakukan penanganan serta mitigasi awal saat terjadi bencana banjir rob. "Dan memang hampir semua destana di empat kecamatan tersebut sering terjadi banjir rob," ujarnya.

Berbicara soal kejadian angin puting beliung yang menimpa Sidoarjo Barat, Karsono mengungkapkan bahwa dalam bulan ini akan ada usaha untuk membentuk destana atau program mitigasi bencana di wilayah yang sempat terdampak. "Rencana kami memang ada fokus ke sana untuk upaya pencegahan, apalagi di paro awal bulan ini sudah cukup sering terjadi angin kencang," katanya.

Apalagi ada beberapa wilayah di Sidoarjo Barat yang berpotensi mengalami bencana banjir cukup parah. Dalam destana, bentuk pelatihan mitigasi dan penanganan ketika terjadinya bencana bisa bermacam-macam. "Pencegahan seperti perantingan dan pemotongan pohon yang sudah besar, mungkin, cara membendung agar angin tidak langsung kena tembok rumah," katanya.

Selain pelatihan mitigasi, menurut Karsono, indikator lain untuk destana berkaitan dengan penyuluhan kepada pemerintah desa atau kecamatan tentang anggaran taktis ketika terjadi bencana. "Memang kami tahu anggaran dana desa tidak banyak, tapi setidaknya ada penyisihan dana taktis risiko bencana," ungkapnya.

Masalah penganggaran dana taktis untuk antisipasi risiko bencana yang memungkinkan dalam waktu dekat akan coba disosialisasikan ke desa-desa. (eza/c6/any)

Jawa Pos

Hari Ini KPU Mulai Verifikasi Faktual Sembilan Parpol

KOTA-KPU Sidoarjo hari ini (17/10) mulai melakukan verifikasi faktual kepemimpinan dan keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Sesuai jadwal, tahapan tersebut akan berlangsung selama dua hari. Yakni mulai 17 hingga 18 Oktober.

Ketua KPU Sidoarjo M Iskak mengatakan, ada sembilan parpol yang akan diverifikasi faktual. Pihaknya membagi anggotanya menjadi tiga tim. Masing-masing tim memverifikasi satu parpol.

Iskak menjelaskan, jumlah partai nasional yang lolos verifikasi administrasi sejumlah 18 parpol. Termasuk di dalamnya sembilan parpol yang memperoleh kursi di DPR RI. Sesuai Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sembilan parpol tersebut tidak mengikuti verifikasi faktual.

"Di Sidoarjo terdapat sembilan partai nasional yang akan dilakukan verifikasi faktual berdasarkan pengumuman dari KPU RI tersebut," katanya.

Sembilan partai itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Ummat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Kebangkitan Nusantara.

Iskak menjelaskan, verifikasi faktual akan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke kantor sekretariat parpol. Selain itu juga kunjungan ke anggota parpol yang tersampling.

Dia melanjutkan, petugas akan melakukan kunjungan ke kantor sekretariat parpol untuk memastikan kebenaran pengurus, keterwakilan perempuan 30 persen dan domisili kantor. Sedangkan kunjungan ke tempat tinggal anggota untuk memastikan bahwa anggota parpol yang dikunjungi terbukti merupakan anggota parpol yang bersangkutan.

Iskak menyebutkan, untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2024, parpol harus menganggotai minimal 1.000 anggota.

Sedangkan nantinya yang akan disampling sebanyak 278 orang per parpol.

Menurutnya, verifikasi kepemimpinan parpol hanya di tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan verifikasi, pengurus yang wajib hadir adalah ketua, sekretaris, dan bendahara.

"Kami berupaya mengantisipasi berbagai kendala yang muncul sehingga proses verifikasi bisa berjalan lancar. Terutama untuk verifikasi keanggotaan parpol," pungkasnya. (nis/vga)



Hingga Sembilan Hari ke Depan, Hindari Jalan Raya Kemantren

Ditutup Total karena Ada Pengerjaan Drainase

SIDOARJO - Beberapa kendaraan roda empat dan dua kecele ketika hendak melewati Jalan Raya Kemantren, Tulangan, kemarin (16/10). Mereka harus mencari alternatif karena ruas jalan tersebut ditutup. Baik dari arah Wonoayu menuju Tulangan maupun sebaliknya. Jalan Raya Kemantren tak bisa dilewati karena sedang ada pemasangan *U-ditch* untuk drainase.

Mereka rupanya tak memperhatikan palang petunjuk adanya perbaikan. Sebenarnya palang tersebut sudah dipasang sejak perempatan Pilang, Wonoayu, dan Jalan Raya Modong, Tulangan. Tetapi, kemarin ada beberapa kendaraan roda empat dan dua yang masih saja menerobos. Akhirnya beberapa warga sekitar turun tangan untuk mengatur lalu lintas agar kendaraan bisa dialihkan ke jalur alternatif.

"Sebenarnya *kan* sudah ada palang di sana, kalau *banner* ini dibikin warga biar mobil ke kanan," ujar Wahyudi, warga sekitar.

Pria 40 tahun itu bersama beberapa remaja sekitar mengalihkan kendaraan roda empat yang hendak menuju Tulangan untuk berbelok ke arah barat melewati jalan alternatif. "Lewat Ganting nanti mentok ke kiri, terus ke kanan lewat Kemantren," katanya sambil menunjukkan arah.

Menurut dia, jalan tersebut ditutup sejak ada pengerukan untuk sambungan drainase



INISIATIF: Warga membantu mengatur lalu lintas di sekitar proyek pembangunan drainase di Jalan Raya Kemantren, Kecamatan Tulangan, kemarin.

atau saluran air di Jalan Raya Kemantren. Tepatnya di utara Puskesmas Tulangan. Pengerjaan proyek dimulai Jumat (14/10) lalu. "Sempat kacau pas Jumat, apalagi sore, banyak orang yang kerja di Surabaya pulang ke arah Tulangan atau Krembung *kan* lewat sini, jadinya macet," katanya.

Untuk motor, warga mencari jalan tembusan lain. Salah satunya, mengalihkannya ke jalan setapak di perkampungan sisi timur proyek. "Kalau mobil ke kanan, motor bisa cepat ke kiri lewat bobolan jalan tanah sebelah rumah warga,

nanti tembus ke ruko depan puskesmas," ujarnya.

Karena aksesnya hanya bisa dilalui satu motor, ada beberapa remaja sekitar yang mengatur jalan keluar masuk motor secara bergantian. Meski begitu, saat volume kendaraan tinggi, tetap terjadi penumpukan kendaraan di jalanan kampung. "Ini masih sepi, mungkin besok pagi ramai pas orang-orang berangkat kerja atau sekolah," kata Wahyudi.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga & Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan bahwa penggalian jalan dengan lebar

sekitar 6 meter tersebut dilakukan untuk pemasangan drainase.

Sebelumnya, ada saluran air di lokasi tersebut. Namun, karena dinilai terlalu kecil sehingga sering mampet, dibuatlah saluran yang lebih besar. Rencananya, *U-ditch* akan dipasang melintang. Lebarnya 1,5 meter. Panjangnya sesuai dengan lebar jalan. Yakni, 6 meter. "Jadi, kami hidupkan lagi begitu," ujarnya.

Penggalian dilakukan sejak Jumat (14/10), sedangkan pemasangan *U-ditch* dimulai hari ini (17/10). Tampak alat berat masih ada di lokasi. Menurut

Eko, besok masih ada penggalian sedikit lagi sebelum dilakukan pemasangan. "Kalau kira-kira selesainya kapan sehingga bisa dibongkar dan dilintasi, ya kurang lebih sembilan hari dari sekarang (kemarin)," tuturnya. Eko mengatakan, rekayasa lalu lintas sudah dikoordinasikan dengan Polsek Tulangan dan dinas perhubungan. Namun, hingga kemarin pihak DPUBMSDA belum mendapatkan gambaran rekayasa lalu lintas. "Yang jelas, R4 sebaiknya kalau ingin ke Tulangan, hindari dulu lewat dari arah Pilang, Wonoayu," ucapnya. (eza/c7/any)

Jawa Pos



Windy Putri
Ramadhani
Eri Cahyadi
saat menerima
plakat.

Ratusan Tenaga Pendamping Desa Lakukan Sertifikasi Profesinya

Sidoarjo, Bhirawa

Para tenaga pendamping desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang berjumlah 134 orang, saat ini sedang melakukan sertifikasi profesinya. Koordinator tenaga pendamping desa Kab Sidoarjo. M. Muflikudin, mengatakan program sertifikasi profesi bagi para tenaga pendamping desa ini baru ada di tahun 2022 ini.

“Sebetulnya bagi teman-teman pendamping yang merupakan tenaga akademis dari Kementerian desa untuk mengawal pembangunan desa ini, tidak masalah. Lancar-lancar saja. Tapi suatu profesi itu harus ada namanya dan diakui,” jelas Muflikudin, belum lama ini, saat menggelar sosialisasi Bimtek sertifikasi profesi, di ruang rapat delta graha Setda Sidoarjo.

Sertifikasi profesi ini nantinya yang akan mengeluarkan adalah dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk keperluan sertifikasi profesinya, Muflikudin, minta agar para tenaga pendamping desa di Kab Sidoarjo bisa mengumpulkan dokumen pendukung. Misalnya foto-foto saat kegiatan, foto surat undangan kegiatan dan sebagainya. “Dokumen yang harus dilengkapi adalah tiga tahun kebelakang, dari tahun 2022 ini. Kemudian, mereka harus bisa lolos mengikuti ujian kompetensinya,” katanya. [kus.ca]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

■ ANGGARAN

Serapan Dana Desa Sudah 80 Persen

KOTA-Menjelang akhir tahun, serapan Dana Desa (DD) sudah maksimal. Hingga akhir triwulan ketiga, serapannya mencapai 80 persen. Koordinator Tenaga Pendamping Desa di Sidoarjo M Muflikudin mengaku optimistis tahun ini serapannya bisa maksimal.

Dia menjelaskan, tahun ini sebanyak 322 desa di Sidoarjo mendapat kucuran DD sebanyak Rp 315 miliar dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut memang tidak sama setiap tahun. Tergantung perhitungan dari Kementerian Keuangan. Masing-masing desa pun besarnya berbeda.

Muflik menjelaskan, penyerapan DD tahun ini hanya tinggal tiga bulan. Yakni Oktober, November dan Desember. Sisa DD yang sebesar 20 persen hingga saat ini masih di kas daerah. Belum masuk ke rekening desa.

"Kami akan kawal terus dan berikan pendampingan untuk penggunaan DD, pemerintah desa tidak perlu takut," katanya. Dirinya juga selalu mengingatkan kepada pemerintah desa agar selalu menggunakan anggaran DD sesuai dengan peruntukan.

Semuanya sudah diatur dalam peraturan Kementerian Desa (Permendes). Misalnya tahun ini, sebanyak 40 persen dimanfaatkan untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20 persen untuk ketahanan pangan dan 8 persen untuk penanganan Covid-19. (nis/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pembangunan SMPN 2 Tulangan Sudah 60 Persen

SIDOARJO - SMPN 2 Tulangan sudah terbangun 60 persen. Fondasi bangunan telah terwujud. Kini pekerja tengah menyelesaikan sebagian tembok dan atap bangunan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tirto Adi menjelaskan, setelah proses pengukuran lahan seluas 22.570 meter persegi itu tuntas, pembangunan fondasi 9 ruangan untuk SMPN 2 Tulangan dikebut. "Progres pembangunannya *on target*. Sekarang sudah selesai sekitar 60 persen," jelas Tirto.

Tirto memastikan proyek pembangunan 5 ruang kelas dan 4 ruang pendukung tersebut tuntas akhir Desember. Pihaknya rutin melakukan pengawasan ke sana. Bahkan, prediksinya lebih cepat dari target. "Perkiraananya, pertengahan Desember seluruh pembangunannya sudah selesai. Jadi lebih cepat dari target," katanya.

Saat ini fisik bangunan sudah tampak. Sembilan ruangan telah berdiri. Beberapa sudah selesai ditembok. Sebagian lagi masih setengah. Dalam minggu ini, fokus pengecoran lantai dan penyelesaian tembok bangunan. Setelah itu, baru pemasangan atap dan plafon hingga memplester tembok. Tirto mengatakan, selama proses pembangunan tidak ada kendala. "Semoga tuntas sesuai target dan bisa dilanjutkan tahun depan untuk penambahan ruang kelas baru di sana," katanya. Tahun depan rencananya dilanjutkan pembangunan 11 ruang belajar lagi di sekolah tersebut.

Sementara itu, tahun ini Dikbud Sidoarjo juga sedang menyiapkan pembangunan sekolah baru SMPN 2 Prambon. Sekolah tersebut bakal dibangun tahun depan. Tahun ini 2 hektare lahan di Desa Wirobiting, Prambon, disiapkan. "Dalam dua minggu ini, proses *appraisal* (perhitungan nilai lahan) dilakukan oleh tim *appraisal*," ujarnya.

Harapannya, awal bulan depan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan bisa mulai dilakukan. (uzi/c6/any)



DIMAS MAULANA/JAWA POS

SUDAH TAMPAK BANGUNAN: Sejumlah pekerja menggarap pembangunan gedung SMPN 2 Tulangan di Desa Grinting kemarin.

Jawa Pos

Umsida Teken MBKM dengan Pemkab Banyuwangi

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) bersama dengan Pemkab Banyuwangi menggelar focus group discussion (FGD). Diskusi itu membahas penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai bagian dari implementasi kegiatan ISS PKKM Collaborative Governance.

Kegiatan yang dihadiri kepala Bappeda Banyuwangi dan pimpinan organisasi perangkat daerah di Banyuwangi. Kegiatan ini bukan pertama kalinya. Beberapa kegiatan serupa juga sempat menghadirkan narasumber internasional conference di Hotel Ketapang Banyuwangi tahun 2018 lalu.

Wakil Rektor Umsida Hana Catur Wahyuni menyampaikan, perpanjangan MoU yang telah berakhir akhir tahun ini diharapkan ada kolaborasi yang berkelanjutan antara pihak Umsida dengan Pemkab Banyuwangi.

“Umsida siap dalam implementasi MBKM serta peningkatan kerja sama yang tertuang dalam MoU dan MoA,” kata Hana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/10).

Pihaknya juga menegaskan siap mendukung kegiatan dalam waktu dekat. Prodi Administrasi Publik yang akan melakukan character building serta government visit ke Pemkab Banyuwangi.

Senada juga disampaikan Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto. Dia mengatakan, siap dalam melakukan implementasi MoU dengan Prodi Administrasi Publik Umsida.

“Harapannya, tidak hanya sekadar seminar atau kuliah umum, tapi lebih ke tataran praktis mengevaluasi 9 prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang outputnya berupa policy brief,” harap Suyanto.

Dalam menindak lanjuti kerja sama tersebut, selain wakil rektor Umsida, turut hadir Ketua Program Studi Administrasi Publik Lailul Mursyidah, Direktur Lembaga Kerja Sama dan Internasional Isna Fitria Agustina, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media Umsida Isnaini Rodiyah, dan Unit Jaminan Mutu Prodi Administrasi Publik Hendra Sukmana. (cat/rd)

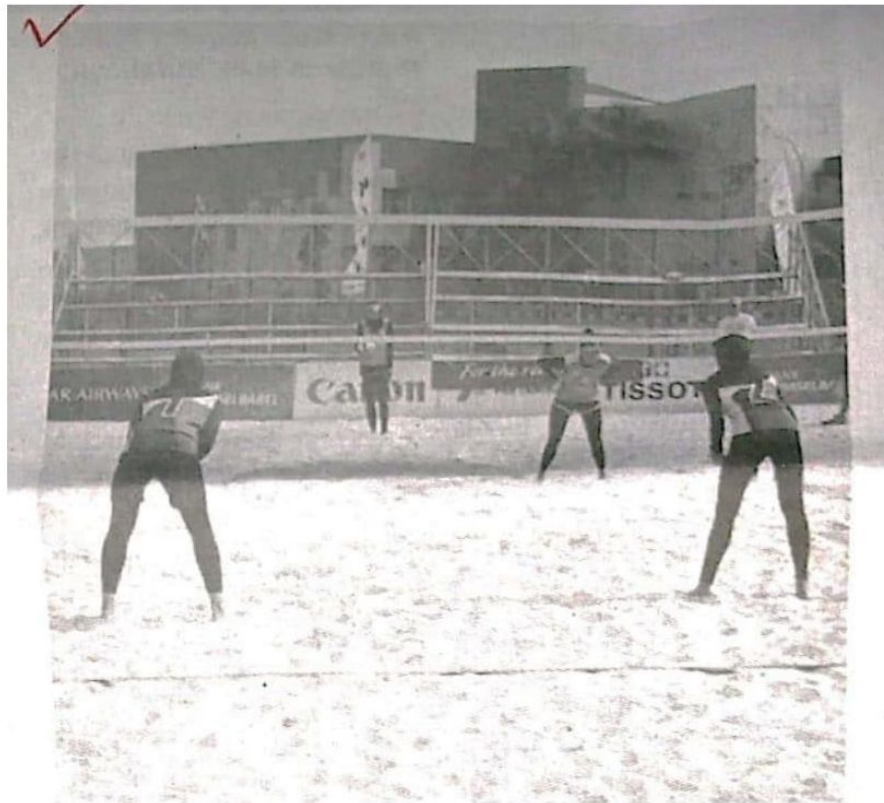


MoU antara Umsida dengan Pemkab Banyuwangi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kejurnas Voli Pantai 2022 akan diadakan di GOR Voli Pantai, Sidoarjo.

Sidoarjo Jadi Tuan Rumah Kejurnas Voli Pantai 2022

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Sidoarjo akan menjadi tuan rumah gelaran Beach Volleyball League (BVL) 2022.

Kejuaraan nasional (Kejurnas) bergengsi ini akan dihelat di GOR Voli Pantai, Sidoarjo. Acara ini akan diadakan pada tanggal 19-24 Desember 2022 mendatang.

Panitia pelaksana setidaknya menargetkan minimal ada 24 tim putra dan putri yang akan bertanding di kejuaraan ini. Setiap provinsi diharapkan mengirimkan masing-masing 2 tim. Baik untuk nomor 2x2 maupun 4x4.

Technical Delegate Voli Pantai Slamet Mulyanto menyampaikan, Indonesia memiliki atlet-atlet voli pantai yang bagus. Mereka sudah berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Dengan diadakannya kejurnas, liga, ataupun kompetisi lainnya, diharapkan menjadi pemacu semangat dan meningkatkan prestasi. Harumnya nama bangsa kita akan semakin semerbak di kancah internasional,” jelasnya, Sabtu, (15/10).

Sebagai tuan rumah, Sidoarjo sendiri akan menampilkan atlet-atlet nasional dan internasionalnya. Kejuaraan ini kian semarak karena Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sidoarjo menyediakan hadiah total Rp 125 juta.

Saat ini panitia tengah bekerja keras menyiapkan segala piranti kebutuhan event nasional ini. Dukungan PBVSI pusat, Pengprov PBVSI Jawa Timur, Pengkab PBVSI Sidoarjo merupakan modal utama terselenggaranya acara akbar ini. (rd)

Kreasikan Bambu Jadi Bedil Jepret hingga Panahan

Siapa yang tak tahu dengan bambu. Selain dikenal sebagai senjata rakyat Indonesia saat melawan para penjajah, bambu juga bisa dikreasikan menjadi alat permainan. Misalnya bedil jepret.

LUKMAN AL FARISI, Wartawan Radar Sidoarjo

SEJUMLAH anak-anak tampak berkumpul di balai among Kampung Lagi Gadget (KLG) Bendet, Pagerngumbuk, Kecamatan Wonoayu. Mereka tampak merangkai potongan bambu berukuran sekitar dua jengkal dengan

karet dan beberapa potongan bambu kecil.

Rupanya mereka tengah belajar membuat bedil jepret, salah satu alat permainan tradisional yang sudah mulai jarang ditemui. Tak lama, alat itu pun jadi.

● Ke Halaman 10



MENYENANGKAN: Sejumlah anak-anak saat belajar membuat mainan dari bambu dan memainkannya.

Kreasikan Bambu...

Belasan pelajar yang masih duduk di bangku SD itu pun langsung mencobanya.

"Ini bagian dari salah satu kurikulum kami. Memang jadwalnya adalah bermain bambu atau dolanan bahan pring," ujar Achmad Irfandi pendiri KLG kepada Radar Sidoarjo. Kegiatan yang mengeksplorasi

permainan tradisional berbahan pring atau bambu itu tampak membuat anak-anak gembira. Maklum, mereka baru mengenal permainan asyik berbahan bambu. Selain asyik, juga ramah lingkungan.

Pemilihan permainan berbahan bambu bukan tanpa alasan. Selain memang menjadi bagian dari permainan tradisional, bambu juga merupakan tanaman endemik

Indonesia. Sehingga sangat dekat dengan masyarakat.

"Berbagai sendi kehidupan masyarakat kita memang memanfaatkan bambu sebagai alat-alat hidup. Mulai dari rumah sampai perabotan," imbuhnya.

Selain bermain bedil jepret, anak-anak juga terlihat asyik bermain bitingan hingga panahan bambu. Menurut Irfan, bambu

memang cocok dibangun dan dikreasikan dengan banyak hal. Termasuk berbagai permainan.

"Sebelumnya ada workshop membuat mainan dari bambu. Kita itu ajari anak-anak untuk berjuang membuat mainannya sendiri. Soalnya anak sekarang itu mentalnya kecil banget. Dikasih tugas dikit, minta dibantu," jelasnya. (*/vga)

lavouter: had

PELAKU USAHA ALOHA MENJERIT MINTA KEADILAN GANTI RUGI, WADUL KE BUPATI

Sidoarjo, Pojok Kiri

Proyek pembangunan fly-over Aloha, Gedangan, berdampak langsung ke 50 pelaku UMKM yang tergabung dalam Paguyuban UMKM Aloha Sidoarjo. Mereka terancam mengalami kerugian puluhan miliar rupiah.

Keresahan para pelaku UMKM aloha ketika tidak pernah diajak berbicara terkait rencana pembongkaran. Tiba-tiba saja sudah ada surat yang dipaksa untuk membongkar dan mengosongkan bangunan usahanya paling lambat tgl 31 Oktober 2022 tanpa mediasi dan kompensasi oleh pihak pemilik lahan Primer Koperasi Angkatan Laut [Primkopal] Juanda.

Perintah pengosongan dan bongkar sendiri bangunan usaha tersebut, tertuang dalam surat bernomor B/225/IX/2022 tanggal 12 September 2022. Hal itu disampaikan oleh Sylvie Fachriah Andani selaku Koordinator Paguyuban UMKM Aloha pada

awak media saat pers rilis di Kawasan Bundaran Aloha, Sidoarjo, Sabtu, 16 Oktober 2022.

"Alasan pemilik lahan atau Primkopal karena kawasan ini akan terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional [PSN] fly over Aloha," Ungkap Sylvie.

Sylvie selaku koordinator UMKM menyesalkan keluarnya perintah paksa pembongkaran itu karena tanpa melalui mediasi atau musyawarah terlebih dahulu dengan pihak pelaku usaha di Bundaran Aloha. Bahkan pihaknya sudah berupaya kirim surat ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, sejak tanggal (07/10/2022) namun belum ada respon hingga kini.

"Ini karena ada proyek Nasional dan demi kepentingan masyarakat banyak, kami rela untuk pindah dari lokasi ini, tapi pihak yang berwenang juga harus memikirkan keberlangsungan usaha dan hidup kami, jangan tiba-tiba kami disuruh mem-

bongkar, mengosongkan dan angkat kaki dari sini tanpa ada musyawarah. Ingat, penyewa lahan disini mempunyai perjanjian kerjasama dengan pihak Primkopal dimana periode sewanya masih berlaku dan sudah kami bayar," tegas Sylvie mewakili sekitar 50 pelaku UMKM terkecuali SPBU dan Minimarket di Bundaran Aloha.

Lanjut Sylvie, pelaku UMKM segala upaya sudah dilakukan untuk memperjuangkan haknya, tapi pejabat terkait baik Primkopal maupun pemerintah Sidoarjo tidak ada yang bisa memberikan solusi.

Ditempat yang sama, salah satu pemilik usaha yang bernama Nosa juga merasa kecewa, karena sejak tahun 2017 yang bersangkutan sudah menghabiskan dana hampir 3.5 milyar untuk membangun usahanya di Aloha.

"Bulan Agustus 2022 saya dapat surat dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut



Sylvie Fachriah Andani, Koordinator UMKM Aloha

LANUDAL Juanda bahwa perjanjian kerjasama saya tidak diperpanjang dan harus mengosongkan lahan paling lambat bulan Oktober 2022 padahal saya menyewa lahan disini 20 tahun sejak 2017 dan tiap 5 tahun diperbarui," jelasnya.

Selepas mendapat izin dari Asisten Logistik (Aslog) Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL), Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, berencana segera mempercepat pemban-

gunan Fly Over Aloha. Lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Fly Over Aloha ini sekitar 1,2 Hektar.

Proyek Fly Over Aloha target selesai pada semester 1 tahun 2024 dengan menghabiskan anggaran sebesar 340 milyar. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional [BBPJN] Jawa Timur-Bali, sebagai penyelenggara infrastruktur jalan dan jembatan tinggal melakukan pembangunannya. (Win/khol)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



dnnmedia.net

Gara-Gara Belum Ikut Latsar, 156 CPNS Sidoarjo Digaji 80%

Admin

2 minutes

Last Updated 2022-10-16T08:46:32Z

Share

-
-
-



Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Dhamroni Chudlori.

DNN, SIDOARJO - Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera melakukan Pelatihan Dasar (latsar) bagi 156 orang CPNS formasi tahun 2021 yang sampai saat ini belum dilaksanakan.

Dhamroni mengatakan Latsar merupakan tahap setelah lulus ujian dan resmi direkrut sebagai pegawai instansi pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan selama 3 bulan ini adalah syarat wajib untuk diangkat menjadi pegawai negeri.

"Ada 316 orang yang masuk dalam formasi penerimaan CPNS pada tahun 2021. Dari jumlah itu, 150 orang diantaranya sudah mengikuti latsar sehingga mereka sudah menerima SK pengangkatan sebagai pegawai negeri dan digaji penuh," ujar Dhamroni yang dihubungi melalui WA-nya, Sabtu (15/10/2022).

Sedangkan 156 orang lainnya sampai saat ini belum jelas kapan diikutkan latsar. "Karena mereka belum latsar, maka konsekuensinya gaji yang mereka terima hanya 80% dari yang seharusnya, hal ini merujuk pada PP Nomor 15 Tahun 2019," tambahnya.

Untuk itu politisi PKB ini berharap agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo segera mengikutsertakan 156 orang CPNS itu dalam latsar, agar mereka mendapatkan hak-haknya secara penuh.

"Kami fahamlah kalau memang APBD kita sekarang ini defisit. Untuk itu kami juga sudah melakukan rasionalisasi anggaran. Namun saran saya kalau hal-hal yang seperti itu (menyangkut kinerja dan hak pegawai-red) janganlah ditunda-tunda. Kasihan mereka," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Imam Mukri ketika dihubungi melalui selulernya belum memberikan jawaban sampai berita ini ditayangkan. **(Hans/Pram)**

MATADELTA
COM



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

hallojatimnews.com

Cegah Kasus KDRT dan Tekan Angka Perceraian, Ratusan Catin Asal Sidoarjo Mengikuti Seminar Pranikah

Redaktur Pelaksana

3-4 minutes



Sidoarjo – Tingginya angka kasus perceraian di Kabupaten Sidoarjo disebabkan karena kurang siapnya bekal yang dimiliki pasangan muda dalam mengarungi rumah tangga. Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), himpitan ekonomi sampai adanya orang ketiga menjadi latar belakang terjadinya perceraian. Rata-rata mereka adalah pasangan muda yang usia pernikahannya relatif seumur jagung.

Permasalahannya, karena pasangan muda rata-rata tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa itu tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Yang terjadi, harapan menjadikan keluarga Sakinah Mawaddah Warahma (Samawa) pupus ditengah jalan. Hal ini yang menjadi perhatian Ormas Persaudaraan Muslimah untuk turun memberikan pemahaman dan pengetahuan lewat seminar pra nikah. Kegiatan ini mencakup aspek penguatan konsep diri pra nikah dan aspek hukum.

Seminar pra nikah dibuka oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, di Hotel Aston Sidoarjo diikuti ratusan peserta muda mudi calon pengantin (Catin), Minggu (16/10/2022).

"Angka perceraian di Kabupaten Sidoarjo, apalagi ketika covid 19 mengalami kenaikan yang signifikan, per hari ada 13 orang yang cerai, jadi kalau jumlah setahun sekitar 4.000 kasus perceraian" jelasnya.

Menurut Gus Muhdlor, panggilan Bupati Sidoarjo program pendidikan pra nikah ini sangat tepat dan sinkron dengan kondisi saat ini. Edukasi ini yang harus menjadi komitmen kita bersama.

"Pada intinya membangun Indonesia adalah lewat organ atau stakeholder paling kecil, bukan RT, bukan camat, bukan bupati bahkan gubernur, tapi kepala rumah tangganya," jelasnya.

Rumah tangga ini organisasi paling simpel, memastikan diri berjalan dengan baik, sesuai dengan fungsi, maka bisa dipastikan kesejahteraan bisa terjamin. Program pendidikan pra nikah Salimah ini menjadi program yang wajib dilanjutkan.

Lebih lanjut, Ketua PD Salimah Sidoarjo, Peny Eva Yanti, ST, juga menegaskan selama ini banyak sekali kasus – kasus problematika dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian, sehingga angka perceraian tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Ini yang menjadi fokus PD salima Sidoarjo untuk melaksanakan program pranikah untuk mengurangi angka perceraian di Sidoarjo.

"Harapannya program ini akan memberikan edukasi kepada calon pengantin dalam memberikan upaya atau solusi terbaik didalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya kelak," jelasnya.

Lebih lanjut, program PD Salimah ini sangat sinkron dengan program yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo dalam membentuk keluarga berencana. Melalui Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo dengan mempersiapkan Calon Pengantin (Catin) Dari sisi kesehatannya.

Dimana calon pengantin di Kabupaten Sidoarjo wajib mengisi di aplikasi elsimil, untuk monitoring dan pendampingan untuk memastikan kesiapan menikah dan hamil, tujuan akhirnya adalah menuju zero stunting. Dan program salimah ini tujuannya adalah pendampingan catin secara psikis.

Harapan kedepannya, adanya kolaborasi kedua program ini bisa mewujudkan keluarga dengan kualitas unggul dan sejahtera.

@red



hallojatimnews.com

Turunkan Angka Stunting di Sidoarjo melalui Program Internalisasi Pengasuhan Balita

Redaktur Pelaksana

3 minutes



Sidoarjo – BKKBN Jatim bersama Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Promosi KIE 1000 HPK melalui Internalisasi Pengasuhan Balita dalam rangka Penurunan Stunting kepada Masyarakat yang bertempat di Ruang Pertemuan Dinas P3AKB. Jum'at (14/10).

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Dra. Maria Ernawati, M.M., diwakili oleh Ibu Desy Mega Aditya, S.Psi, M.Psi, Psikolog, selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana ahli Muda, Peserta seluruh Penyuluh KB di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 48 orang, koordinator atau perwakilan TPK dari setiap kecamatan sebanyak 18 orang, dan Kader COE Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKA sebanyak 4 orang. Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Dinas P3AKB, Bapak drg. Syaf Satriawarman, SP.Pros.

Pada kesempatan ini, Bapak Syaf berpesan tentang bahaya Stunting yang saat ini mengancam generasi Indonesia. Dimana masa 1000 HPK berperan penting untuk diperhatikan dengan seksama, pada masa inilah anak berkembang secara optimal. Hal ini yang penting untuk diinformasikan kepada masyarakat.

"Pada kesempatan ini penempelan sticker dipakai sebagai bentuk KIE yang dapat disampaikan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dimana Sticker digunakan sebagai pengingat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama stunting pada baduta dan balita di Sidoarjo," ucap Bapak Syaf menegaskan tujuan dari kegiatan.



Pada Gerakan Penyebarluasan informasi pentingnya 1000HPK dan balita ini juga merupakan wujud nyata upaya Perwakilan BKKBN provinsi Jawa Timur dalam percepatan penurunan Stunting. Gerakan ini dilakukan secara serempak oleh Penyuluh KB, TPK, dan Kader COE akan turun langsung ke keluarga berisiko stunting yang terdiri dari Keluarga Ibu Hamil, Keluarga Ibu Baduta, dan Keluarga Ibu Balita.

Dimana tiap Keluarga Berisiko Stunting yang menerima informasi pentingnya 1000 HPK akan diberi dan dipasang stiker "Ayo Cegah Stunting dengan mengoptimalkan Pengasuhan 1000 HPK".

Adapun kegiatan ini juga dihadiri Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ibu Desy Mega Aditya, S.Psi, M.Psi, Psikolog, selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana ahli Muda. Beliau memberikan motivasi kepada Penyuluh KB dan Tim Pendamping Keluarga dalam kegiatan pemberian informasi dan penempelan sticker pada kegiatan ini.

Jumlah keluarga berisiko stunting yang menjadi target sasaran gerakan penyebarluasan informasi pentingnya 1000 HPK dan balita di Kabupaten Sidoarjo adalah sebanyak 57.068 keluarga.

@red

Polisi Sidoarjo Berpatroli sambil Bagikan Nasi Bungkus

Media online Kharismanews.id

2-3 minutes

X

Aa

🔍



Sidoarjo, Kharismanews.id – “Sekali dayung, dua pulau terlampaui” itu mungkin menjadi peribahasa yang tepat untuk kegiatan rutin unit patrol Sat Samapta Polresta Sidoarjo ini. Bagaimana tidak, di hari Jumat (14/10/2022) anggota Samapta Polresta Sidoarjo membagikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan sembari melakukan patroli di daerah hukum Polresta Sidoarjo. Kegiatan patroli sambil sedekah tersebut sudah menjadi rutinitas yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat.

Makanan yang dibagikan di Rabu Berkah dan Jumat berkah tersebut merupakan hasil sedekah dari anggota Polresta Sidoarjo. Sedekah tersebut berupa sebungkus nasi dan minum. “Sedekah ini didapatkan dari anggota Polresta Sidoarjo yang secara ikhlas dan sukarela memberi untuk kebaikan bersama,” Ujar Aiptu Musyanto.

Makanan tersebut dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan seperti sopir angkot, tukang parkir, dan tukang becak. Sepanjang jalan yang di lewati mobil patroli, Aiptu Musyanto bersama dua anggota lain membagikan makanan serta menjaga kamtibmas agar tetap kondusif. “meskipun sedekah ini tidak banyak, tapi kami ikhlas dan berharap apa yang kami lakukan dapat sedikit membantu,” ujar Aiptu Musyanto.

Selain itu, anggota patroli Samapta Polresta Sidoarjo tersebut juga memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat agar bersama menjaga keamanan di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan patroli dan Jumat berkah kali ini berjalan dengan aman dan lancar. Masyarakat yang mendapat bagian merasa terbantu dan berterimakasih kepada anggota Polisi yang sedang berpatroli. “Terbantu sekali saya dengan kegiatan bapak Polisi, disamping menjaga keamanan juga bagi-bagi nasi bungkus,” Tutur salah seorang sopir angkot.

(sund)